

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Waktu : 11.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Departemen Ilmu Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

***Ambtenaar* Bumiputera di Kota Makassar Tahun 1906-1942**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Disusun oleh:

BELLA ASTARI PATTA

F0611 713 05

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

TAHUN 2023

SKRIPSI

AMBTENAAR BUMIPUTERA DI KOTA MAKASSAR

TAHUN 1906-1942

Disusun dan diajukan oleh:

BELLA ASTARI PATTA

F061171305

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 12 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



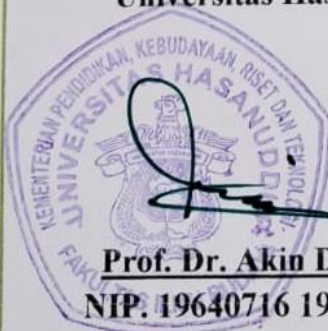
Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 197608272008011 011

Drs. Dias Pradadimara, M.A.M.S.
NIP. 196412171998031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 197608272008011 011

HALAMAN PENGESAHAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

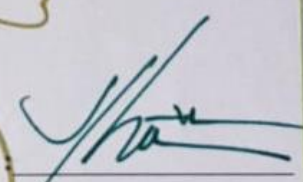
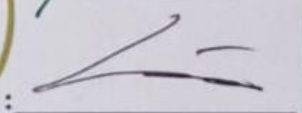
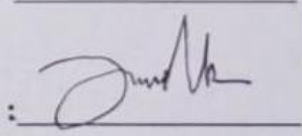
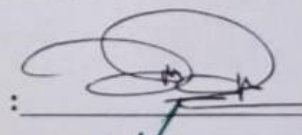
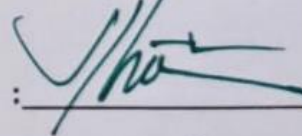
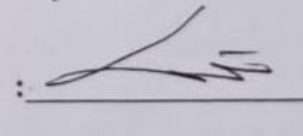
Pada hari Kamis, 12 Januari 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

AMBTENAAR BUMIPUTERA DI KOTA MAKASSAR 1906-1942

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Januari 2023



- | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| 1. Dr. Ilham, S.S , M.Hum. | Ketua | : |  |
| 2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Amrullah Amir , M.Hum | Penguji I | : |  |
| 4. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. | Penguji II | : |  |
| 5. Dr. Ilham, S.S , M.Hum. | Konsultan I | : |  |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan II | : |  |

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Bella Astari Patta

NIM : F061171305

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

AMBTENAAR BUMIPUTERA DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1906-1942

adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 06 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan



Bella Astari Patta

KATA PENGANTAR

Akhirnya penulis tiba pada bagian tersulit ini. Sejak lama terpikirkan untuk mengisi bagian ini dengan paragraf apa dan deretan nama siapa yang berjasa dalam hidup penulis selama menyelesaikan studi. Berulang kali penulis menghapus dan mencari kata paling sempurna untuk menulisnya. Akhirnya kita sampai. Karya berjudul ***Ambtenaar Bumiputera di Kota Makassar pada tahun 1906-1942*** dapat terselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab penulis yang selama ini menempuh studi strata I pada Departemen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Karya di tangan pembaca ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap tema kota, kolonial dan modernisme pada awal abad ke-20. Beberapa buku, diskusi, maupun media lain bertema tersebut, memicu rasa penasaran penulis tentang bagaimana perkenalan orang-orang pribumi dengan modernisme pada masa kolonial. Salah satu unit sosial yang memiliki ilustrasi tersebut ialah *ambtenaar bumiputera*. Meskipun banyak sejarawan merekonstruksi kajian tersebut dengan detail dan apik, namun penelitian sejenis di Kota Makassar hampir tidak ada. Selain karena sumber yang tidak tercatat dengan baik, perihal akses arsip di kota Makassar juga tidak banyak. Olehnya, bermodalkan surat kabar sezaman, beberapa arsip dan sumber sekunder yang penulis telusuri di ANRI dan Perpustakaan Nasional, penulis berusaha menyajikannya seideal mungkin. Namun, penulis sadari masih banyak bagian kosong yang perlu dilengkapi. Barangkali akan muncul penelitian lain yang melengkapi karya ini.

Dalam merampungkan karya ini, bagian penting yang menyadari penulis ialah proses yang terjadi merupakan bentuk pendewasaan dan bahan refleksi panjang perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Didikan yang penulis terima sejak kecil membentuk penulis sebagai pribadi agak perfeksionis. Hal itu menjadi hambatan penulis ketika mengalami kebuntuan, atau tidak ada perasaan puas dengan hasil penulisan dan butuh meyakinkan diri sebelum mengajukan draft ke dosen pembimbing. Beruntungnya, penulis dipertemukan dengan berbagai pihak yang memberi arah dan pertimbangan kepada penulis dalam proses penulisan, sikap, maupun langkah-langkah menuju hari baru. Terima kasih. Tanpa kalian barangkali penulis tetap menjadi bunga yang tidak pernah mekar.

Pertama, puji syukur kepada **Allah SWT** dengan rahmat dan berkat-Nya yang selalu ada, menemani penulis menghadapi hari riuh dan malam-malam sunyi penuh isak tangis. Terima kasih telah memberi begitu banyak dari yang hamba layak terima. Bimbing langkah kakiku, aku hilang tanpa-Mu.

Terima kasih pula kepada civitas akademik Fakultas Ilmu Budaya dan Departemen Ilmu Sejarah, karenanya penulis merasakan euforia sebagai mahasiswa sejarah sekaligus sastra. Kepada dosen-dosen dan staf departemen Ilmu Sejarah, Ibu **Dr. Nahdia Nur, M.Hum** selaku penasehat akademik, Ibu **A.Lili Evita,S.S.,M.Hum**, Ibu **Dr. Ida Liana Tanjung,S.Pd,M.Hum**, Mendiang Ibu **Magriet Moka Lappia,S.S.,M.S.**, alm. Bapak **Prof. Dr. Rasyid Asba,M.A**, Bapak **Dr. Bambang Sulisty, M.Hum**, Bapak, **Dr. Suriadi Mappangara,M.Hum**, Bapak **Dr.H.Muh. Bahar Akkase Teng.,LCP.,M.Hum**, Bapak **Nasih, S.S.,M.A**, dan Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A**. Terimakasih atas semua

ilmu dan pendidikannya selama penulis menjadi mahasiswa. Abadilah segala amal dan ilmu bapak ibu sekalian.

Terima kasih kepada bapak **Dr. Ilham. S.S.,M.Hum** selaku Ketua Departemen sekaligus dosen pembimbing I dan bapak **Drs.Dias Pradadimara, M.A.,M.S** selaku dosen pembimbing II. Melalui ilmu dan karya bapak-bapak sekalian yang memotivasi penulis untuk menggarap tema modernisme dan kota. Serta bapak **Amrullah Amir, S.S.,M.A.,Ph.D** yang beberapa tahun lalu menyarankan penulis untuk memilih *ambtenaar* sebagai objek kajian skripsi ketika kita sedang bincang-bincang di kantin kolong. Atas saran dan pertimbangan bapak-bapak sekalian-lah karya ini diramu dan berusaha disaji dengan baik.

Kepada **Arya Yulia Andika**, sahabat baik yang dengan berani mendampingi penulis memaparkan makalah di Surabaya tahun 2019 silam. Kepribadianmu yang kuat, berani dan ambisius turut menyulut api dalam diri penulis. Kita adalah kombo dari kobaran tersebut, meski dalam porsi berbeda. Untuk teman jurusan penulis, **Nurhazizah, Aliefka, Nurjannah, Yusrah, Ismi, Risma, Fahmi, Taufiq, Jihad, Harmina, Rani, April, Faridah, Anisa**, dan teman lain di **Ilmu Sejarah 2017**. Kebersamaan kita di ruang kuliah meninggalkan kenangan manis dalam benak penulis. Serta **Ulfah**, perbedaan tahun masuk kuliah membuat kita tak punya memori bersama di kelas, tapi obrolan seru mendekatkan emosional kita. Panjang umur para calon sejarawan, meski nantinya banyak jalan lain yang akan kita tapaki.

Untuk **Rizka, Aul, Widya** dan **Dhipa**, teman-teman seperantauan penulis. Berkat kalian penulis masih fasih menggunakan logat ibukota dan tidak merasa

asing di kota ini, sebab kita beradaptasi bersama dengan kultur dan budaya sini. Semoga kaki kita semakin jauh melangkah yang nantinya membawa keberhasilan bagi diri kita. Sungguh senang bisa berjumpa lagi di kota ini atau negara lainnya.

Untuk **Anna, Maya** dan **Unu**, kalian adalah teman-teman paling jujur yang pernah penulis temui. UKM Menulis mempertemukan kami di tempat terindah. Membentuk pertemanan intelektual kita melalui kerja-kerja organisasi, penulisan dan FGD yang menguatkan emosional satu sama lain. Betapa menyenangkan jika di depan nanti kita berkolaborasi, meski masing-masing jalan yang kita pilih berbeda. Tetap mengakar dan menjalar, di manapun!

Kepada kakak saya, **Fathul Karimul Khair**. Puji syukur Tuhan mempertemukan penulis dengan sosok pengajar sekaligus kakak, meski tak sedarah. Sosok yang membebaskan penulis dari tahanan gua seperti *Allegory of the cavenya* Plato yang kita baca bersama beberapa tahun lalu. Terima kasih telah mengarahkan penulis untuk memilih batu mana yang harus dipijak ketika mendaki puncak ilmu pengetahuan. Buat **Nandito**, teman diskusi terbaik yang siap sedia mengoreksi penulisan ini dan semua tawaran rasional nan emosional itu. Kalian adalah orang yang tiada henti meminta penulis untuk terus belajar. Doa paling syahdu untuk budi baik dan mimpi mulia kalian. Jaga api tetap nyala!

Untuk **Daud Desmawanto**, dukunganmu menemani penulis pada waktu susah dan senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, saat sehat maupun sakit selama tahun terakhir pendidikan ini. Semoga selalu dan saling seperti itu! Atas kehangatan hati dan perbincangan kita, hubungan yang kita bangun rasanya begitu

manis dan sederhana. Namun, kita saling mengerti begitu banyak tantangan yang perlu dihadapi nantinya. Ayo tumbuh bersama, meski mesranya kecil-kecilan dulu.

Buat adik-adik penulis, **Anella Hasri Patta**, kau mulai tiba di masa yang penulis jejak sekarang, tetap berani dan tuntaskan yang telah dimulai. **Dimas Bayu Ashari Patta**, kakak yakin apa yang kau pilih nantinya, selalu mekar dan membawa berkah. **Dyandra Banyu Asri Patta** dan **Alfina Shidqia Patta**, maafkan kakak, ketika masa emas kalian kakak tidak di sana. Adik-adikku, tumbuhlah dengan mimpi dan zaman kalian. Jangan takut, ada kakak di sebelah kalian.

Terakhir, kepada mama **Sri Lestari** dan ayah **M.Hasyim Ashari Patta**, yang doa dan restunya tiada putus. Ucapan terima kasih tak pernah cukup membalas semua kasih sayang, kepercayaan dan dukungan yang terus mengalir sejak penulis lahir. Jika mati dan dilahirkan kembali, kakak tetap memilih menjadi anak kalian. Karya ini kupersembahkan untuk kalian, sebagai buah pikir putrimu yang menyiapkan umurnya di bangku kuliah selama lima tahun. Terima kasih karena terus percaya dan tak henti berbangga. Sehat dan bahagia selalu, orang tuaku.

Makassar, Januari 2023

Bella Astari Patta

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR ISTILAH..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| ABSTRAK..... | xviii |
| ABSTRACT..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Batasan Masalah | 8 |
| 1.3.1. Batasan Spasial..... | 8 |
| 1.3.2. Batasan Temporal..... | 8 |
| 1.3.3. Batasan Tematik..... | 9 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| 1.6 Metode Penelitian | 13 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II KOTA MAKASSAR AWAL ABAD KE-20 | 18 |
| 2.1. Pemerintah Kota Makassar | 19 |
| 2.2. Ruang Kota Makassar..... | 25 |
| 2.3. Kondisi Ekonomi Perdagangan di Kota Makassar | 34 |
| 2.4. Sosial Budaya Penduduk Kota Makassar | 40 |

| | | |
|---|--|------------|
| 2.5. | <i>Ambtenaar</i> Bumiputera dan Gaya Hidup Kelas Menengah di Kota Makassar | 49 |
| BAB III KEPEGAWAIAN BUMIPUTERA | | 60 |
| 3.1. | Pendidikan untuk <i>Ambtenaar</i> Bumiputera..... | 60 |
| 3.2. | Golongan dan Jabatan <i>Ambtenaar</i> Bumiputera | 67 |
| 3.3. | Rekrutmen <i>Ambtenaar</i> , Magang dan Kenaikan Jabatan..... | 73 |
| 3.4. | Diskriminasi antar <i>Ambtenaar</i> Eropa dan Bumiputera di Kota Makassar | 80 |
| BAB IV MENANTANG DEPRESI EKONOMI 1930-AN | | 84 |
| 4. 1. | Awal Depresi Ekonomi 1930-an di Hindia Belanda | 85 |
| 4. 2. | Depresi Ekonomi 1930-an Melanda Makassar | 86 |
| 4. 3. | Penghematan dalam Birokrasi | 91 |
| 4.3.1. | Membatasi Rekrutmen Pegawai Baru | 91 |
| 4.3.2. | Pemecatan Pegawai | 92 |
| 4.3.3. | Pengurangan Gaji Pegawai | 93 |
| 4.4. | Kondisi <i>Ambtenaar</i> Bumiputera Pasca Depresi 1930-an. | 99 |
| BAB V KESIMPULAN | | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 108 |
| LAMPIRAN | | 115 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Nama-nama Walikota Makassar pada masa Pemerintah Hindia Belanda | 21 |
| Tabel 2.2 Nama-nama Kepala distrik Bumiputera dan Timur Asing di Kota Makassar Tahun 1907 | 23 |
| Tabel 3.1 Jumlah Siswa <i>Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren</i> (OSVIA) Makassar Berdasarkan Asal Daerah dan Jurusan..... | 66 |
| Tabel 3.2 Struktur Kepegawaian Bumiputera di Kota Makassar | 72 |
| Tabel Grafik 4.2. Perkembangan Kepemilikan Modal Usaha di Makassar 1817- 1948..... | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1. Peta Fort Rotterdam and Environs 17th Century..... | 27 |
| Gambar 2.2. <i>Societeit de Harmonie</i> di Makassar pada awal abad 20. | 29 |
| Gambar 2.3. Gedung Balai Kota (<i>Gemeentehuis</i>). | 31 |
| Gambar 2.4. Iklan dari surat kabar Pemberita Makassar..... | 37 |
| Gambar 2.5. Iklan dari surat kabar Pemberita Makassar..... | 47 |
| Gambar 2.6. Rumah Bugis dan Warung Makan di Makassar. | 54 |
| Gambar 2.7. Pegawai <i>Raad van Justitie</i> dan <i>Landraad</i> Makassar, 1908-1909... | 55 |
| Gambar 2.8. Pegawai di Fort Rotterdam Makassar tahun 1941..... | 56 |
| Gambar 2.9. Iklan Orange Squash di surat kabar Pemberita Makassar. | 57 |

DAFTAR ISTILAH

| Istilah | Keterangan |
|--------------------------------|--|
| <i>Afdeeling</i> | : Sebutan wilayah administratif pada masa kolonial Hindia Belanda yang setingkat dengan Kabupaten. |
| <i>Ambonkamp</i> | : Kampung Ambon, merujuk pada wilayah yang warganya berasal atau bersuku Ambon. |
| <i>Ambtenaar</i> | : Pegawai yang bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda, biasanya ditunjuk dan digaji oleh pemerintah. |
| <i>Assistent Controleur</i> | : Pejabat Belanda di bawah pembantu <i>controleur</i> . |
| Asisten Wedana | : Pejabat junior kepegawaian negeri Bumiputera yang bertanggungjawab atas subdivisi kewedanaan. |
| <i>Bestuurbonds</i> | : Serikat pengurus . |
| <i>Bestuurschool</i> | : Sekolah asrama, sekolah pemerintahan, sekolah yang mengharuskan siswanya tinggal di lingkungan pendidikan. |
| <i>Binnenlandsche Bestuur</i> | : Disingkat B.B. Pemerintahan dalam negeri pada zaman kolonial. |
| <i>Blangkon</i> | : kain penutup kepala yang dibentuk rapi sebagai kopiah. Ciri khas orang Jawa. |
| <i>Bouw en woonverordening</i> | : Peraturan tentang izin bangunan. |
| <i>Buitengewesten</i> | : Istilah administrasi Hindia Belanda untuk wilayah di luar Pulau Jawa. |
| Bupati | : Kepala kabupaten; pejabat turun-temurun yang termasuk tingkatan tertinggi Kepegawaian Negeri Bumiputera. |
| <i>Burgemeester</i> | : Walikota, pemimpin wilayah administrasi kotapraja. |
| <i>Compagnies Tuin</i> | : Kebun Kompeni. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Controleur</i> | : Pejabat Belanda di bawah pembantu residen. |
| <i>Decentralisatie wet</i> | : Undang-undang desentralisasi. |
| <i>Frontier</i> | : Batasan, digunakan untuk merujuk pada daerah perbatasan. |
| <i>Gallarang</i> | : Kepala adat, gelar untuk kepala adat atau kampung bumiputera. |
| <i>Gemeente</i> | : Kotapraja, status kotapraja pada masa kolonial. |
| <i>Gemeente WaterleidingBedrijf</i> | : Perusahaan Air Minum Daerah. |
| <i>Gemeentehuis</i> | : Kantor walikota. |
| <i>Gemeenteraad</i> | : Dewan kota, lembaga legislatif pada tingkat kotapraja. |
| <i>Gouverneur Woning</i> | : Rumah Jabatan Gubernur. |
| <i>Gouvernementsladen</i> | : Wilayah di bawah Pemerintahan Langsung. |
| <i>Groote Oost</i> | : Sebuah kegubernuran di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1938 sampai 1946. Kegubernuran ini terdiri dari semua pulau di sebelah timur Kalimantan dan Jawa. Ibu kotanya adalah Makassar yang terletak di Sulawesi. |
| <i>Hinderordonnantie</i> | : Izin khusus tentang aktivitas perdagangan dan industri. |
| <i>hoofd-district</i> | : Jabatan kepala distrik, fungsi jabatannya sama seperti wedana. |
| <i>hoofd-onderdistrict</i> | : Nama lain dari asisten wedana; biasanya digunakan pada di luar pulau Jawa. |
| <i>Hooggerrechtschof</i> | : Mahkamah Agung. |
| <i>Hulp schrijver</i> | : Pembantu jurutulis. |
| <i>Inlandsche Raad van Justitie</i> | : Pengadilan negeri untuk bumiputera. |
| <i>Javasche Courant</i> | : Nama surat kabar di Jawa yang eksis pada masa kolonial. |

| | |
|---|---|
| Juru tulis | : Kerani; pegawai yang mengurus administrasi sederhana (misalnya mencatat, mengetik, menerima dan mengirimkan surat). |
| <i>Kapitein</i> | : Gelar, untuk pemimpin bumiputera yang menjabat pada wilayah administrasi distrik di Makassar. |
| <i>Karaeng</i> | : Gelar, sebutan untuk pemimpin bumiputera yang populer di Sulawesi Selatan, utamanya suku Makassar. |
| <i>Klein ambtenaarsexamen</i> | : Ujian pegawai-pegawai kecil, kualifikasi bagi pegawai-pegawai rendah. |
| <i>Korte Verklaring</i> | : Perjanjian pendek, pernyataan pendek. |
| <i>Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen</i> | : Sekolah Kejuruan Pelayaran. |
| <i>Kweekschool</i> | : Sekolah kejuruan |
| <i>Landraad</i> | : Kantor pengadilan untuk bumiputera. |
| <i>Matowa</i> | : Sebutan bagi orang lokal (Bugis-Makassar) yang dituakan atau dihormati. |
| <i>memorie van antwoord</i> | : Nota balasan; catatan balasan dalam membalas surat atau pernyataan. |
| Menteri politie | : Jabatan polisi; bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. |
| <i>Onder-collecteur</i> | : Sebutan untuk kepala pengumpul pajak. |
| <i>Overproductie</i> | : Kondisi saat hasil produksi berlebihan. |
| <i>Pajak Baratu</i> | : Pajak judi |
| Patih | : Pejabat kepegawaian Negeri Bumiputera; asisten-kepala seorang Bupati dan biasanya bertanggungjawab atas kewedanaan utama. |
| <i>PostKantoor</i> | : Kantor pos. |
| <i>Post en Telegrafkantoor</i> | : Kantor pos dan telegraf. |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Prestise</i> | : Wibawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang. |
| <i>Protestvergadering</i> | : Aksi protes; pertemuan untuk protes atau kritik. |
| <i>Raad van Justitie</i> | Kantor Pengadilan. |
| <i>Ranglijst</i> | : Struktur atau peringkat dalam sebuah kantor zaman kolonial. |
| <i>Regering</i> | : Pemerintah. |
| <i>Regerings reglement</i> | : Regulasi konstitusional atau Undang-undang Negara Hindia Belanda. |
| <i>Residen</i> | : Pejabat kolonial Belanda, berkedudukan antara gubernur dan pembantu residen. |
| <i>Songkok</i> | : Semacam peci yang dihiasi dua pita warna emas di pinggirnya. Topi khas orang Bugis dan Sulawesi Selatan secara umum. |
| <i>Staatsblad</i> | : Lembaran resmi pemerintah kolonial, atau undang-undang resmi. |
| <i>Swapraja</i> | : Wilayah di bawah Pemerintahan Tidak Langsung. |
| <i>Vergadering</i> | : Pertemuan (dalam bahasa Belanda) |
| <i>Verlov</i> | : Cuti. |
| <i>Volksraad</i> | : Dewan rakyat, lembaga legislatif setingkat pemerintahan pusat. |
| <i>Wedana</i> | : Kepala daerah dari bumiputera yang berkedudukan di antara regent/bupati dan patih. Biasanya sebutan ini populer di pulau Jawa. |
| <i>Westernisasi</i> | : Proses meniru budaya Barat seperti tingkah laku, gaya hidup, dan bidang lain. |

DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Kepanjangan |
|------------------|--|
| B.B | : <i>Binnenlandsche Bestuur.</i> |
| H.B.S | : <i>Hoogere Burgerschool.</i> |
| JMJ | : <i>Jesus Maria Joseph.</i> |
| KPM | : <i>Koninklijke Paketvaart Maatschappij.</i> |
| M.B.B | : <i>Makassaarsche Bestuurders Bond.</i> |
| MULO | : <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.</i> |
| N.B.G | : <i>Nederlandsch Bijbelgenootschap.</i> |
| NBG | : <i>Nederlandsch Bijbelgenootschap.</i> |
| OSVIA | : <i>Opleideing School Voor Inlandsche Ambtenaren.</i> |
| VOC | : <i>Vereenigde Oost Indische Compagnie.</i> |

MATA UANG

1 gulden (atau florin, *f.*) = 100 sen Hindia Belanda.

ABSTRAK

Bella Astari Patta, Nomor Induk Mahasiswa F061171305, dengan judul “*Ambtenaar* Bumiputera di Kota Makassar Tahun 1906-1942” dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S.,M.Hum. dan Drs. Dias Pradadimara,M.A.,M.S.

Penelitian ini berfokus pada kemunculan dan dinamika *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar sepanjang tahun 1906-1942 dengan mengkaji dari sistem kepegawaian serta kehidupan mereka sebagai masyarakat perkotaan. *Ambtenaar* bumiputera adalah pegawai bumiputera yang bekerja pada Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, seperti arsip, surat kabar dan foto-foto sezaman, dan memoar. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran dan semangat kemodernan berkembang dalam masyarakat bumiputera, terutama *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar. Khususnya yang tercermin dari peran, gaya hidup dan respon mereka ketika menghadapi krisis ekonomi pada masa Depresi Ekonomi 1930-an.

Hasil penelitian ini ialah *Ambtenaar* bumiputera di kota Makassar merupakan kelas sosial baru yang muncul akibat perubahan struktural yang terjadi di awal abad ke-20. Sistem kepegawaian terstruktur dan pendidikan khas barat membentuk mereka menjadi unit sosial yang memainkan peran sentral dalam masyarakat bumiputera. Di samping itu, gelombang modernisasi di kota Makassar kala itu menumbuhkan cara pandang, selera, gaya hidup dan semangat kemodernan *ambtenaar* bumiputera. Salah satu aktualisasi semangat kemodernan itu tercermin dari cara mereka menghadapi krisis ekonomi pada masa Depresi Ekonomi 1930-an. Namun, usaha yang mereka lakukan tidak lebih dari untuk kepentingan mereka sendiri.

Kata Kunci : *Ambtenaar*, Sistem Kepegawaian, Modern, Depresi Ekonomi.

ABSTRACT

Bella Astari Patta, Student Identification Number, F061171305, with the title “*Ambtenaar Bumiputera* in Makassar City in 1906-1942” was supervised by Dr. Ilham, S.S.,M.Hum. and Drs. Dias Pradadimara,M.A.,M.S.

This research focuses on analysing the emergence and the social dynamic of a specific social group called *ambtenaar bumiputera* in Makassar from 1906-1942 by specifically scrutinizing the officialdom of *ambtenaar* system and their lifestyle as urban society. *Ambtenaar bumiputera* is a *bumiputera* employee who worked under the rule of the the Nederlandsch-Indië Government. The method of this research is historical method which dominantly uses literature study and uses sources like archives, news, relevant photos, and memoir. The purpose of this research is to analyze the impact of modernity toward the life of *ambtenaar bumiputera* in Makassar. Specifically, this analysis will focus on the role, life action, and their responses toward the Great Depression in 1930s.

The result of the research shows that *ambtenaar bumiputera* in Makassar was the result of structural change of the colonial administration in Makassar which began in the early 20th century. Structural change which proposes by this research refers to the creation of structured officialdom and the western education. Those two changes impact the *ambtenaar bumiputera* way of thinking and further made them a significant social group in their society. Besides, the wave of modernization growth different mindset and lifestyle of *ambtenaar bumiputera*. One of the representation of this impact could be observed from their responses toward the economic crisis of Great Depression in 1930s. Their responses mostly individualistic and self-survival.

Keyword: *Ambtenaar*, Staffing System, Modern, The Great Depression.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal abad ke-20, kota di Indonesia banyak mengambil alih kegiatan dari pedesaan. Pergeseran dari desa ke kota memicu terjadinya perubahan sosial.¹ Hal itu ditandai dengan munculnya kelas sosial baru dalam masyarakat bumiputera yang terlepas dari kegiatan pertanian, yaitu warga kota sebenarnya.² Kelas baru tersebut berasal dari sektor industri dan sektor pendidikan yang tampil dengan karakteristik berbeda. Sebagai kelas sosial baru, mereka perlu ideologi baru yang mendukung eksistensi mereka di tengah masyarakat tradisional dan kolonial.³

Kota-kota kolonial di Hindia Belanda sejak akhir abad ke-19 menjadi pusat penyebaran ide modern, termasuk Kota Makassar. Makassar adalah kota kolonial di pesisir pantai barat bagian selatan Pulau Sulawesi. Letaknya yang strategis sebagai persilangan jalur niaga dari arah barat dan selatan menuju timur, menjadikannya jantung transmisi hasil kebudayaan barat di kawasan Hindia Timur.⁴ Menjelang abad ke-20, Kota Makassar mulai bertransformasi menuju kota

¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,2003) hlm. 59.

² *Ibid*, hlm. 64.

³ *Ibid*. hlm. 63.

⁴ Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20”, *Jurnal Masyarakat Sejarawan Indonesia*, Vol. 1(2), 2018, hlm. 47.

modern.⁵ Kebijakan dari segi birokrasi, penciptaan lingkungan maupun pendidikan di kota, menampilkan simbol dan ekspresi kemodernan oleh warga kota, termasuk kelas sosial baru.

Kelas sosial baru yang muncul di Kota Makassar didominasi dari sektor pendidikan, yaitu kelompok pelajar, pers dan pegawai birokrasi.⁶ Salah satu yang lahir di era kemodernan dan berusaha tampil dengan semangat baru ialah *ambtenaar* bumiputera. Kata *Ambtenaar*⁷ berasal dari bahasa Belanda, dalam terjemahannya berarti pegawai negeri, orang yang ditunjuk dan digaji oleh Pemerintah Belanda.⁸ Maka, *Ambtenaar* bumiputera dapat diartikan sebagai pegawai atau orang yang berasal dari kalangan bumiputera yang bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda. Mayoritas *ambtenaar* bumiputera berasal dari kaum bangsawan dan masyarakat pribumi yang menempuh pendidikan kolonial. Jenis jabatan mereka beragam sesuai tingkatan dan kategori wilayahnya.

Makassar, sejak tahun 1824 administrasinya termasuk wilayah *Gouvernementsladen*.⁹ Hal itu semakin dipertegas ketika tahun 1906 Makassar

⁵ *Ibid*, hlm. 48.

⁶ Sarkawi B. Husain., *Sejarah Sekolah Makassar* (Makassar:Ininnawa,2015) hlm. 130.

⁷ Istilah tersebut digunakan secara umum untuk menyebut pegawai pemerintah kolonial baik yang berasal dari kalangan Eropa, Bumiputera maupun Timur Asing. Dalam kalangan bumiputera istilah *ambtenaar* memiliki sebutan lain, seperti priyayi, pangreh praja atau menak. Istilah tersebut hanya digunakan di beberapa wilayah khususnya di Jawa. Bagi wilayah lainnya di Hindia Belanda kebanyakan menggunakan istilah *ambtenaar* bumiputera.

⁸ Heather Sutherland., Terj. Sunarto., *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983) hlm. 22.

⁹ Dias Pradadimara., “Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian

ditetapkan sebagai *gemeente* atau daerah otonom, di mana pemerintahannya berhak mengelola kota secara mandiri.¹⁰ Maka, transformasi kota dan pembangunan kantor-kantor baru yang membutuhkan pegawai berpendidikan dan profesional, mulai digencarkan.

Dalam *gemeente* pemerintahannya dipimpin oleh seorang *burgemeester* atau walikota¹¹ sekaligus ketua *gemeenteraad* atau Dewan Kota. Jabatan tingginya diisi oleh *ambtenaar* Eropa. Sedangkan, untuk bumiputera jabatan tertingginya sebatas kepala distrik atau kepala kampung. Beberapa yang terpilih dalam mewakili etnisnya dapat berperan dalam *gemeenteraad*. Sebagian lain bekerja sebagai pelaksana pelayanan publik, seperti di pengadilan, kantor pos, perusahaan air minum dan instansi lain milik pemerintah kolonial. Kelompok inilah yang muncul sebagai kelas sosial baru berpendidikan dengan semangat kemodernan berusaha mewarnai dinamika masyarakat bumiputera di Kota Makassar.

Kemunculan *Ambtenaar* bumiputera sebagai kelas sosial baru terjadi begitu kompleks. Tahun 1905, Pemerintahan Hindia Belanda mengirim pasukan ekspedisi militer dan memaksa penguasa lokal di Sulawesi selatan untuk tunduk dan menyerahkan kekuasaannya.¹² Melalui *korte verklaring*, Pemerintah Hindia

Selatan di Abad ke-19”, Jurnal *Lensa Budaya*, Vol.12, No. 2, Oktober 2017. hlm.61.

¹⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 171 tanggal 12 Maret 1906.

¹¹ Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar: Proses “Etnisasi” sebuah kota”, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004) hlm. 82.

¹² Pasca penaklukan tersebut, Sulawesi Selatan dan Tenggara seluruhnya telah berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah Sulawesi

Belanda berhasil menapakkan kekuasaannya secara penuh dan merombak struktur lembaga tradisional ke birokrasi modern. Perubahan itu membuat kalangan bangsawan kehilangan kedudukan mereka, terutama bagi yang menolak bekerja sama. Sementara bagi yang menerima akan diperbaiki kedudukannya.¹³ Namun mereka wajib mengikuti pendidikan kolonial terlebih dahulu sesuai kebijakan birokrasi modern yang berlaku kala itu.¹⁴

Sejak tahun 1901, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis¹⁵ dan mulai membangun sekolah-sekolah kolonial yang terfokus di kota. Salah satu sekolah kolonial di Kota Makassar, ialah *Opleideing School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA), yaitu sekolah kepegawaian khusus calon *ambtenaar* bumiputera yang berdiri tahun 1910. Mulanya, sebagian besar murid dan pegawai pemerintah adalah orang-orang keturunan Melayu, Jawa, Manado dan Ambon. Sangat sedikit orang-orang Bugis-Makassar yang bersedia masuk sekolah kolonial. Hal itu terjadi karena anggapan bahwa memasuki lembaga pendidikan Belanda

Selatan dan Tenggara dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan nama Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawah (Gouvernement Celebes en Onderhoorigden). Lihat Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. 2.

¹³ *Ibid.* hlm.194.

¹⁴ Sarkawi, *Loc.Cit.*

¹⁵ Politik etis merupakan kebijakan yang berpangkal pada gagasan “kewajiban moral” dan “hutang budi” pemerintah kolonial terhadap kesejahteraan tanah jajahan, termasuk pada pembangunan sumber daya manusia pribumi. Kebijakan ini mengutamakan tiga prinsip; edukasi, emigrasi dan irigasi untuk tanah jajahan. Lihat Ricklefs, M.C., Terj. Tim penerjemah Serambi, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010) hlm. 327.

akan “dibelandakan” atau dijadikan *ata* (budak) yang mengabdikan pada kepentingan kolonial.¹⁶ Barangkali anggapan tersebut benar adanya. Karena pendidikan etis dalam prakteknya malah diarahkan guna mendapat tenaga kerja terdidik dan murah yang bekerja di perkebunan atau sebagai pegawai kantor kolonial.¹⁷ Namun seiring berjalannya waktu kondisi itu berubah. Kelompok bangsawan terpaksa terjun dalam birokrasi modern. Salah satu tokoh yang berpengaruh ialah Lanto daeng Pasewang. Ia pernah bersekolah di OSVIA dan menjabat sebagai jaksa di Pengadilan Negeri Bumiputera (*Inlandsche Raad van Justitie*) Makassar pada tahun 1935-1942.¹⁸

Perubahan birokrasi dari tradisional ke modern membutuhkan sistem kepegawaian yang terstruktur. Pemerintahan Hindia Belanda mengembangkan aturan pada praktik pendidikan, prosedur rekrutmen, jenis jabatan hingga jenjang karir *ambtenaar* bumiputera. Surat kabar dari Pemberita Makassar tanggal 6 Maret 1915¹⁹ mengabarkan adanya peraturan baru untuk *ambtenaar* bumiputera. Peraturan tersebut mengatur tentang kepangkatan pegawai bumiputera yang berbeda dengan yang dijalankan pada abad sebelumnya. Tahun-tahun setelah itu juga muncul peraturan lain yang menimbulkan dinamika bagi *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar.

¹⁶ Sarkawi, *Op.Cit.*, hlm. 131.

¹⁷ Agus Suwignyo., *Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme*, (Yogyakarta: Quantum Yogya, 2019) hlm. 113.

¹⁸ *Regerings Almanak van Nederlandsch-Indië* 1938, hlm. 148.

¹⁹ Pemberita Makassar, *Peratoeran Baroe oentoek Ambtenaar Bestuur Boemi Poetera*, Sabtu 6 Maret 1915, hlm. 1.

Pada tahun 1930, beriringan dengan Depresi Ekonomi yang melanda dunia, kehidupan *ambtenaar* di Kota Makassar mulai bergejolak. Pasalnya, mereka merupakan kelompok sosial paling terdampak oleh kondisi tersebut, sebab mereka menjadi korban penghematan dan pengetatan anggaran pemerintah kolonial. Depresi Ekonomi (*The Great Depression*) ialah peristiwa global yang mempengaruhi ekonomi sejumlah besar manusia dan wilayah di berbagai penjuru dunia.²⁰ Hal itu berdampak pula pada ekonomi Hindia Belanda.

Ambtenaar bumiputera sebagai kelas sosial yang terikat pada pemerintah kolonial tentu kehidupan ekonominya bergantung pada kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan penghematan kas negara dengan cara menurunkan gaji *ambtenaar*. Kebijakan itu mengakibatkan para *ambtenaar* mengalami masa-masa sulit. Sebagai bentuk perlawanannya, diadakan *protestvergadering* atau aksi protes pada tanggal 1 Juli 1931 di *Sientje Bioscoop* yang dihadiri sebanyak 350 orang pegawai dari berbagai kelompok.²¹ Protes tersebut diinisiasi oleh *Makassarsche Bestuurders Bond* yang juga menghimpun beberapa serikat pekerja di Makassar. Tujuannya ialah untuk menentang penurunan gaji *ambtenaar*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat pentingnya mengelaborasi bahasan *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar ke dalam penulisan sejarah.

²⁰ Dias Pradadimara, "Satu Cerita Berbeda Tentang Krisis: Perubahan dan Transformasi di Wilayah Pedesaan Sulawesi Selatan pada Abad Ke-20" dalam *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi selama Abad 20*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016) hlm.199.

²¹ Pemberita Makassar, *Protestvergadering: Menentang penoeroenan Gadji-gadji Ambtenaar di Makassar*, 2 Juli 1931, hlm. 2.

Beberapa sumber pustaka dan arsip menunjukkan bahwa objek tersebut tidak kalah menarik sebab, mereka turut menampilkan ekspresi kemodernan dan keunikan tersendiri sebagai kelas sosial baru di perkotaan yang muncul karena perubahan struktural di awal abad ke-20. Penulis merasa perlu mengembangkan mobilitas sosial tersebut dengan meneliti dinamikanya. Maka, penelitian ini berfokus pada dinamika *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar sepanjang tahun 1906-1942 dengan menelaah dari sistem kepegawaian serta kehidupan mereka sebagai kelas sosial perkotaan, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa Depresi Ekonomi 1930-an. Dengan judul penulisan skripsi “***Ambtenaar* Bumiputera di Kota Makassar Tahun 1906-1942**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian, rumusan masalah merupakan komponen penting yang berguna untuk mengarahkan pengumpulan data relevan dan menjadi landasan dalam penulisan. Pokok pembahasan dalam penelitian ini ialah dinamika *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar sepanjang tahun 1906-1942 dengan mengkaji dari sistem kepegawaian serta kehidupan mereka sebagai masyarakat perkotaan. Berdasarkan uraian data pada pembahasan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kepegawaian yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda, seperti sistem pendidikan, kepangkatan dan rekrutmen pegawai serta kebijakan lainnya yang muncul sepanjang tahun 1906-1942?
2. Sebagai kelas sosial perkotaan, bagaimana dinamika *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar yang tercermin dari gaya hidup dan respon

mereka dalam menghadapi krisis ekonomi saat masa Depresi ekonomi tahun 1930-an?

1.3 Batasan Masalah

Penulisan sejarah akan lebih mudah dan terarah jika penulis melakukan pembatasan terhadap objek kajiannya. Hal itu diperlukan agar penulis memfokuskan kajiannya serta terhindar dari pembahasan yang terlalu luas, baik dari segi waktu, wilayah maupun topik penelitian.

1.3.1. Batasan Spasial

Batasan Spasial dalam penelitian ini ialah wilayah administrasi *Gemeente* kota Makassar pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Jangkauan wilayahnya meliputi enam distrik, yaitu Distrik Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan Mariso.

1.3.2. Batasan Temporal

Batasan temporalnya berfokus pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1906 – 1942. Alasan pemilihan kurun waktu tersebut karena awal abad ke-20 merupakan era penjajahan baru, di mana terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dari birokrasi tradisional ke modern di wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk di Kota Makassar.

Di Makassar perubahan sistem tersebut dapat dianalisis dari tahun 1906, sejak Makassar berstatus sebagai *Gemeente*. Perubahan itu menuntut pegawai yang profesional dan berwawasan luas. Dari situ dapat dianalisis mekanisme perekrutan serta pendidikan para *ambtenaar* di Kota Makassar. Penulis membatasi penelitian ini sampai tahun 1942, sebab pada tahun tersebut berlaku kependudukan

Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Hal ini menandakan berakhirnya kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda dan berganti fungsi sesuai yang diberlakukan oleh pemerintahan militer Jepang.

1.3.3. Batasan Tematik

Adapun tema dari penelitian ini berkaitan dengan kajian sosial kota, yaitu akan berfokus pada dinamika *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar dengan mengkaji dari sistem kepegawaian serta kehidupan mereka sebagai warga kota, terutama dalam menghadapi krisis saat masa Depresi Ekonomi 1930-an.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem kepegawaian yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda, seperti sistem pendidikan, kepangkatan dan rekrutmen serta kebijakan lainnya yang muncul sepanjang tahun 1906-1942.
2. Untuk mengetahui dinamika *ambtenaar* di Kota Makassar sebagai kelas sosial perkotaan dan sejauh mana semangat kemodernan berkembang, yang tercermin dari gaya hidup dan respon mereka dalam menghadapi krisis ekonomi saat masa depresi ekonomi pada tahun 1930-an.

Adapun manfaat penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Memperkaya khasanah historiografi lokal dan nasional Indonesia.
2. Memberikan sumbangsih bagi kajian sejarah kota dan kolonial, khususnya Kota Makassar.

3. Memberikan referensi bagi penulis selanjutnya yang bermaksud untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, sumber kepustakaan maupun penelitian terdahulu sangatlah penting. Tulisan bertemakan *ambtenaar* pada masa kolonial, identik dengan kata kunci elite birokrasi, elite modern ataupun priyayi. Penelitian tema sejenis umumnya membahas kemunculan serta peranan elite dalam stratifikasi masyarakat bumiputera dengan berbagai sudut pandang. Namun, pembahasan tentang kehidupan *ambtenaar* bumiputera pada tahun 1906-1942 dari sudut pandang sistem kepegawaiannya belum banyak dikaji, khususnya kajian Kota Makassar.

Usaha menghindari kerancuan objek studi serta memperkaya materi penulisan, maka penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, jurnal, dan skripsi. Sumber pustaka pertama adalah skripsi karya Ummu Faradillah dengan judul “Munculnya Elite Birokrasi Kolonial di Sulawesi Selatan: 1906-1942”. Karya tersebut menggambarkan proses terbentuknya elite birokrasi kolonial di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20.

Karya tersebut menjelaskan bahwa peralihan sistem birokrasi dari tradisional ke modern melalui penandatanganan *Korte Verklaring* pada tahun 1906 menjadi titik awal penguasaan pemerintah kolonial secara penuh di Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut mengakibatkan kedudukan penguasa lokal di Sulawesi Selatan berubah, tidak memiliki kuasa penuh atas wilayahnya. Keadaan tersebut

juga didukung dengan perkembangan pendidikan dari penerapan kebijakan politik etis yang nantinya menjadi faktor penentu bangkitnya elit lokal di Sulawesi Selatan.

Dalam karya tersebut objek penelitiannya ialah pegawai yang bekerja pada pemerintah, khususnya yang memiliki jabatan dalam birokrasi kolonial dan muncul sebagai elit lokal di Sulawesi Selatan. Kelebihan karya tersebut ialah mampu menganalisis elit lokal dalam birokrasi berdasarkan etnisitasnya. Kelemahan karya studi ini ialah sebagian besar tulisan berfokus pada pendidikan yang ada di Kota Makassar dan juga membahas riwayat sekolah kolonial.

Relevansi karya tersebut untuk penulisan ini adalah sebagai acuan dalam memahami mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan, yang dalam ranah tersebut juga mempengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan di Makassar. Karya studi milik Ummu ini menjadi referensi penulis untuk menelusuri peranan *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar yang tergolong sebagai elit.

Sumber pustaka berikutnya ialah buku karya Sarkawi B. Husain berjudul “Sejarah Sekolah Makassar; di tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elite Baru (1876-1942)”. Buku tersebut menarasikan perjalanan sistem pendidikan dari pendidikan tradisional ke sekolah formal di Kota Makassar pada awal abad ke-20. Sarkawi juga menyimpulkan bahwa kehadiran pendidikan kolonial di Makassar tidak hanya bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan akan tenaga birokrasi pemerintahan, namun lebih jauh membawa pengaruh signifikan terhadap munculnya berbagai organisasi sosial keagamaan dan pergerakan, perkembangan pers dan terbentuknya elit baru di perkotaan. Penulis menggunakan buku ini untuk menjelaskan pendidikan *ambtenaar* bumiputera, yakni OSVIA di

Makassar. Melalui buku ini pula penulis berusaha menganalisis karakteristik kelas sosial baru yang muncul di Kota Makassar, khususnya kelompok *ambtenaar* bumiputera.

Sumber pustaka selanjutnya ialah jurnal karya Ilham Daeng Makkelo berjudul “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20”. Dalam jurnal tersebut memaparkan transformasi Kota Makassar menuju kota modern sepanjang abad ke-20 dengan menelusuri tiga aspek proses modernisasi, yakni (1) produksi ruang modern, seperti teknologi, penataan dan lingkungan fisik kota, (2) ekspresi dan respon kemodernan, (3) kontradiksi dalam proses modernisasi. Dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa Makassar sebagai kota modern menampilkan aspek kemodernan tersendiri di setiap eranya. Salah satu bagian yang berkaitan dengan penelitian penulis ialah pembahasan terkait modernitas pada masa kolonial yang dimulai pada awal abad ke-20. Penulis memandang bagian tersebut relevan untuk menjelaskan kondisi Kota Makassar dan ekspresi kemodernan yang direpresentasikan oleh individu maupun masyarakat Makassar, tak terkecuali oleh *ambteenar* bumiputera sebagai kelas sosial baru perkotaan.

Buku berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini ialah *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* karya dari Heather Sutherland. Buku tersebut mengulas tentang dinamika sistem birokrasi kolonial dari masa VOC hingga pemerintahan politik etis. Secara umum, buku ini menyorot kehidupan para elite priyayi Jawa, termasuk gaya hidup, kedudukan sosialnya, hingga pendidikan yang ditempuh para priyayi. Heather juga menjelaskan bagaimana mobilitas sosial pada awal abad ke

20 mencair berkat lahirnya para cendekiawan modern yang akhirnya berdampak pada munculnya gerakan pembaharu dalam politik. Buku ini membantu penulis dalam memahami kehidupan para *ambtenaar* secara historis, utamanya dalam menghadapi depresi ekonomi tahun 1930-an. Buku ini digunakan penulis sebagai perbandingan untuk melihat perbedaan situasi dan respon antara di Jawa dengan ruang lingkup penelitian yang akan ditulis, yaitu Kota Makassar.

Penelitian ini berfokus pada dinamika *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar pada tahun 1906 sampai 1942 sebagai kelas sosial yang terikat kebijakan kolonial. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini berusaha menjelaskan dinamika yang terjadi dengan menyajikan data dan fakta historis menggunakan konsep sosial, serta disandingkan secara komparatif pada batasan spasial pada studi lain. Dengan menelusuri sejauh mana peran dan semangat kemodernan berkembang dalam masyarakat bumiputera, terutama *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar yang tercermin dari peran, gaya hidup dan respon mereka ketika menghadapi krisis ekonomi pada masa Depresi Ekonomi 1930-an.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian sejarah merupakan proses seorang sejarawan merekonstruksi sebuah peristiwa di masa lampau bertopang pada data yang diperoleh melalui tahapan analisis, pengujian dan seleksi secara kritis. Hasil penelitian kemudian dianalisis untuk proses pengambilan kesimpulan. Metode penelitian sejarah sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan

sejarah. Meskipun terbagi menjadi beberapa tahap, tiap tahapannya memiliki keterkaitan erat. Untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya. Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ini;

Pertama adalah pemilihan topik terkait dengan *ambtenaar* atau pegawai, elite birokrasi atau priyayi, sistem kepegawaian, kelas sosial perkotaan, dan sejarah Kota Makassar abad ke-20 serta peristiwa sejarah yang relevan sebagai refleksi historis. Kedua, pengumpulan sumber terkait dengan buku-buku, arsip maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan sumber ini dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat dan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia di Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan selama dua bulan sepanjang pertengahan bulan September sampai pertengahan November 2020.

Sebelum melakukan pengumpulan sumber, penulis mempertimbangkan dan menelusuri topik mengenai sumber-sumber yang akan dicari. Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber primer berupa surat kabar yang terbit di Kota Makassar dan sekitarnya pada rentang waktu tahun 1915-1937 seperti surat kabar *Pemberita Makassar* dan *Anak Kontji*. Namun sumber primer yang berkaitan dengan topik *ambtenaar* di Kota Makassar sebagian besar ditemukan di surat kabar *Pemberita Makassar*. Selain sumber tersebut, penulis juga menemukan foto-foto sezaman tentang pegawai pemerintahan dan ruang-ruang kota di Makassar.

Sumber-sumber pendukung lainnya berupa buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ditelusuri oleh penulis di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin serta beberapa artikel di internet mengenai penelitian ini.

Ketiga, menganalisis sumber kepustakaan yang diperoleh. Pada tahap ini penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang penulis kumpulkan. Tahapan ini berguna untuk menentukan apakah sumber yang diperoleh dapat digunakan atau tidak. Pada sumber primer, kritik dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal ialah kritik yang menguji keabsahan sumber yang digunakan. Dengan cara ini penulis melihat apakah data yang ditemukan ini valid dan relevan dengan zamannya, dan apakah berita-berita yang dikeluarkan dilansir dari sumber yang resmi atau tidak. Kritik internal adalah kritik yang digunakan untuk menguji kredibilitas secara kritis terhadap konten dan substansi isi dari sumber tersebut. Proses kritik dilakukan seiring dengan proses menerjemahkan, sebab banyak sumber yang menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Belanda dan ada sumber yang sepenuhnya menggunakan bahasa Belanda.

Keempat, melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikritik. Pada tahap ini penulis berusaha menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta dari sumber yang telah dikumpulkan secara kronologis kemudian direkonstruksikan menjadi sebuah kesimpulan (sintesis). Tantangan yang penulis temui dalam tahap ini ialah ada beberapa sumber yang pembahasannya terputus atau tidak lengkap dan beberapa istilah yang sulit ditafsirkan maknanya.

Dengan demikian, data yang kurang mencukupi tersebut tidak penulis masukkan dalam pembahasan di penelitian ini.

Kelima adalah penulisan sejarah. Ini merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis menarasikan hasil analisis dari semua tahap yang telah dilewati dengan cara menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin sebagai sebuah tulisan sejarah. Penulis dituntut untuk meneliti, mengungkapkan dan menjelaskan peristiwa di masa lampau secara kronologis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan, mendeskripsikan secara analisis serta menafsirkan tentang sistem kepegawaian Hindia Belanda dan pasang surut kehidupan kelompok *ambtenaar* di Kota Makassar pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1906-1942.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis maka dalam penyusunan karya tulis yang berjudul *Ambtenaar* Bumiputera di Kota Makassar pada Tahun 1906-1942, penulis akan menyusun dalam lima bagian yang dimuat secara sistematis. Berikut ini gambaran dalam setiap babnya:

- Bab I berisi gambaran umum mengenai alasan penulis mengambil tema dan judul penelitian ini. Dalam bab I penulis juga memaparkan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka yang menunjang data untuk penulisan karya tulis ini.
- Bab II berisi gambaran umum mengenai Kota Makassar pada awal ke-20 . Dalam bab ini, penulis akan membahas perubahan sistem pemerintahan kota, perkembangan modernisasi dan pembangunan ruang kota, kondisi

ekonomi serta sosial budaya penduduk termasuk gaya hidup modern yang juga ditunjukkan oleh *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar.

- Bab III akan membahas tentang sistem kepegawaian *ambtenaar* di Hindia Belanda. Pada bab ini penulis membaginya ke dalam tiga sub-bab, diantaranya: (a) pendidikan untuk *ambtenaar* bumiputera, (b) golongan dan jabatan *ambtenaar* bumiputera (c) rekrutmen pegawai, magang dan kenaikan jabatan. Pembahasan pada bab ini dinilai perlu, sebab digunakan untuk menganalisis kehidupan para *ambtenaar* berdasarkan sistem yang mengikat mereka.
- Bab IV merupakan puncak dari pembahasan penulisan ini, yakni kehidupan *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar dalam menghadapi depresi ekonomi 1930-an. Dalam bab tersebut akan membahas tentang awal depresi ekonomi 1930-an di Hindia Belanda dan dampaknya di Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Serta membahas kehidupan *ambtenaar* di Kota Makassar dalam menghadapi depresi ekonomi 1930-an yang dicerminkan dari respon mereka saat itu.
- Bab V adalah hasil dari penjabaran ke-empat bab sebelumnya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan dalam tulisan tersebut. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah yang telah penulis ajukan, sekaligus merupakan penutup dari penulisan karya ini.

BAB II

KOTA MAKASSAR AWAL ABAD KE-20

Makassar merupakan kota kolonial di pesisir pantai barat bagian selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Titik awal berkembangnya Makassar sebagai kota kolonial bermula ketika benteng-benteng milik Kerajaan Gowa-Tallo, kecuali Benteng Ujung Pandang dihancurkan oleh Speelman akibat kekalahan Kerajaan Gowa dalam perang Makassar tahun 1669.¹ Kemudian Benteng Ujung Pandang diambil alih kompeni VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) dan berganti nama menjadi Benteng Fort Rotterdam. Pemukiman di sekitar Benteng Rotterdam adalah kota baru yang tumbuh dari pelbagai elemen campuran yang menjadi akar Kota Makassar di kemudian hari.²

Menjelang abad ke-20, Makassar menjadi pusat penyebaran kebudayaan Barat atau *westernisasi* di Hindia Timur. Hal itu terjadi seiring dengan masuk dan berkembangnya modernitas di kota-kota kolonial Hindia Belanda.³ Walaupun Makassar terbilang sebagai wilayah pinggiran yang berada jauh dari pusat Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, tetapi kemodernan tetap berkembang.

¹ Sarkawi B.Husain., *Sejarah Sekolah Makassar* (Makassar:Ininnawa,2015), hlm. 16.

² Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar: Proses “Etnisasi” sebuah kota”, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004) hlm. 82.

³ Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20.” *Jurnal Masyarakat Sejarawan Indonesia*, Vol. 1(2), 2018, hlm. 49.

Ilham berpendapat bahwa, terdapat dua indikator penting pendorong kemodernan di Makassar, yaitu (1) kebijakan pemerintahan langsung dari pegawai berbangsa Belanda, (2) penetapan Makassar sebagai salah satu *gemeente* atau daerah otonom pada tahun 1906.⁴ Keduanya mempercepat transformasi Makassar menuju kota Modern. Transformasi tersebut termanifestasi dalam peran kebijakan pemerintah baik dari segi produksi ruang kota, sosial, ekonomi, dan mengejawantah dalam gaya hidup warganya, termasuk *ambtenaar* bumiputera. Oleh sebab itu, bab ini fokus menjelaskan keterhubungan *ambtenaar* bumiputera dengan transformasi kemodernan di Kota Makassar pada awal abad ke-20 yang ditinjau dari aspek pemerintahan kota, keruangan, ekonomi, dan sosial budaya.

2.1. Pemerintah Kota Makassar

Pada tahun 1903 atas usul A.W.F. Idenburg kepada Parlemen Belanda berhasil mengajukan Undang-Undang atau *Decentralisatie Wet* dan mendapat tanggapan positif dari Parlemen.⁵ *Decentralisatie wet* yang diajukan Idenburg merupakan penambahan pasal dari pasal 68 *Regeringsreglement* 1854 dengan menambahkan pasal 68a, 68b, dan 68c yang memberikan kesempatan membentuk daerah-daerah otonom.⁶ Pemberian otoritas penuh kepada wilayah tertentu, di mana

⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵ Teti Hestiliani, “*Secentralisatie Wet van Nederland Indies 1903*”, Jurnal *ISTORIA*, Vol. 15, No. 2., September 2019, hlm 211.

⁶ Purnawan Basundoro., *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi 1906-2012*, (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmaterra Publishing, 2012) hlm. 5.

jumlah penduduk Eropanya lebih banyak. Mengingat bahwa sejak akhir abad ke-18, gelombang kedatangan orang Eropa ke Hindia Belanda semakin tinggi. Mayoritas dari mereka menetap di berbagai kota.⁷ Kota-kota di Hindia Belanda yang memenuhi syarat sesuai *decentralisatie wet* diubah statusnya menjadi kota otonom dengan pemerintahannya sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat. Kota otonom diberi nama *gemeente*. Status *gemeente* tersebut diberikan kepada kota-kota di Hindia Belanda, seperti Batavia, Meester-Cornelis (Jatinegara), Bogor, Surabaya, Malang, Bandung, Medan, dan Makassar.⁸

Kota Makassar secara politis masuk ke dalam kategori wilayah yang berada langsung dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau *Governementsladen*. Secara administratif Hindia Belanda, Makassar termasuk wilayah di luar Pulau Jawa (*Buitengewesten*). Pada abad ke-19, wilayah Kota Makassar merupakan distrik dari *Afdeeling* Makassar dalam Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigden*). Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 31a tahun 1824, wilayah distrik Makassar meliputi benteng Fort Rotterdam, *Negory Vlaardingen*, kampung-kampung dan pulau-pulau kecil yang terletak di Selat Makassar yang dikenal dengan kepulauan Spermonde.⁹ Namun pada tahun 1906 distrik Makassar ditetapkan sebagai sebuah *gemeente* (kotamadya), di mana pemerintahannya berhak mengatur, mengelola keuangan dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ Sarkawi, *Op.cit.*, hlm.48.

menata kota secara mandiri.¹⁰ Perubahan status itu menjadi tonggak sejarah berdirinya pemerintahan Kota Makassar dan diperlukan perangkat birokrasi.

Kota Makassar mendapatkan status *gemeente* secara resmi pada 1 April 1906 melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 171 tanggal 12 Maret 1906. Sistem *gemeente* dipimpin oleh *burgemeester* atau walikota. Namun kota-kota di Hindia Belanda berstatus *gemeente* baru mendapatkan kepala pemerintahannya atau walikota sekitar tahun 1916, sedangkan Kota Makassar dua tahun setelahnya.¹¹ Tepat tanggal 15 Agustus 1918 diangkatlah J.E. Dambrink (masa jabatan 1918-1927) sebagai WaliKota Makassar (*Burgemeester van Makassar*).¹² Dalam rentang waktu penetapan hingga adanya walikota, jalannya pemerintahan dipegang Kepala Pemerintahan Daerah *Afdeeling* Makassar.

Tabel 2. 1

Nama-nama Walikota Makassar pada masa Pemerintah Hindia Belanda

| No. | Nama Walikota | Masa Jabatan |
|-----|------------------|--------------|
| 1 | J.E. Dambrink | 1918-1927 |
| 2 | J.H. de Groot | 1927-1931 |
| 3 | G.H.J Beikenkamp | 1931-1932 |
| 4 | F.C van Lier | 1932-1933 |
| 5 | Ch. H. Ter Laag | 1933-1934 |
| 6 | J. Leewis | 1934-1936 |

¹⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 171 tanggal 12 Maret 1906.

¹¹ Dias Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar: Proses "Etnisasi" sebuah kota",. *Loc.Cit.*

¹² Ummu Faradillah, "Munculnya Elit Birokrasi Kolonial Di Sulawesi Selatan: 1906-1942." (Makassar: Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, 2018) hlm. 44.

| | | |
|---|------------|-----------|
| 7 | H.F. Brune | 1936-1942 |
|---|------------|-----------|

Sumber: Ummu Faradillah, "Munculnya Elit Birokrasi Kolonial Di Sulawesi Selatan: 1906-1942."

(Makassar: Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, 2018) hlm. 106.

Perubahan status *gemeente* juga mengatur batas administrasinya. Pada 1906, wilayah *Gemeente* Makassar meliputi enam distrik, yaitu Distrik Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah, dan Mariso yang setiap distriknya terdapat sebelas hingga dua puluh kampung.¹³ Meskipun secara politis Kota Makassar berada di bawah Pemerintah langsung, namun secara praksis pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan yang “setiap golongan dipimpin orang dari golongan itu sendiri.”¹⁴ Dengan kata lain, membiarkan warga kota golongan bumiputera maupun Timur Asing sebisa mungkin hidup di bawah pemimpin mereka sendiri. Setiap distrik diperintah oleh seorang kepala distrik dari bumiputera dengan gelar *kapitein* untuk distrik Makassar, Wajo, Melayu dan Ende. Sedangkan, distrik Ujung Tanah dan Mariso dikepalai oleh kepala distrik yang disebut *gallarang*. Untuk orang Cina diperintah oleh seorang pejabat yang disebut Mayor Cina. Sementara Orang Timur Asing yang bukan Cina mempunyai pemimpin sendiri dengan gelar *kapitein*.

Menurut Pradadimara, kelompok Timur Asing di Makassar berperan sebagai jembatan sosial dan ekonomi di antara kelompok Eropa dan Bumiputera.¹⁵

¹³ Sarkawi B. Husain, *Op.Cit.*, hlm. 49-52.

¹⁴ J.S. Furnivall., *Op.Cit.*, hlm. 274.

¹⁵ Dias Pradadimara, *Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 6.

Maka, kepala kampung menjadi semacam jembatan pengawas dan pengendali yang menghubungkan antara sistem dualisme yang berlaku di Kota Makassar. Kepala-kepala distrik mendapat gaji bulanan dari pemerintah kolonial Belanda yang umumnya berkisar antara f 50- f 125. Mereka tidak menerima kenaikan gaji rutin seperti *ambtenaar* biasa, tetapi mereka memiliki penghasilan lain dari pungutan pajak, hasil kebun dari lahan usaha gubernur Hindia Belanda, berbagai pungutan dari rakyat dan dari pajak *Baratu* (judi).¹⁶

Pengangkatan kepala kampung di Makassar didasarkan pada sistem patron-klien tradisional. Seorang kepala kampung dipilih oleh dan di antaranya para laki-laki dewasa di kampung itu yang disebut *Matowa* beserta imam kampungnya.¹⁷ Hal itu berlaku untuk pengangkatan kepala kampung di distrik Ujung Tanah dan Mariso.¹⁸ Sedangkan, kepala kampung Makassar, Wajo, Melayu dan Ende diangkat langsung oleh pemerintah dengan persetujuan dan keputusan gubernur, tanpa meminta persetujuan pemimpin adat setempat.

Tabel 2.2
Nama-nama Kepala distrik Bumiputera dan Timur Asing
di Kota Makassar Tahun 1907

| Jabatan | Nama |
|-------------------------|---------------------------|
| Kapitein distrik Melayu | Intje Abdul Wahab Masikki |

¹⁶ Harun Kadir, dkk., *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*,. (Jakarta: Depdikbud, 1978), hlm. 78.

¹⁷ Dias Pradadimara, *Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar, Loc.Cit.*

¹⁸ Muklis dan Anhar Gonggong, *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950.*, (Ujung Pandang: P3MP Unhas- The Toyota Foundation Japan, 1992), hlm. 12.

| | |
|--------------------------|--|
| Kapiten distrik Makassar | Moedhinoeng |
| Kapitein distrik Wajo | Abdul Razak |
| Kapiten distrik Ende | Moehamad Amien daeng Masarro |
| Gallarang Ujung Tanah | Saleh daeng Mataijang |
| Gallarang Mariso | Laebo daeng Bantang |
| Kapitein Arabian | Sech Hadjie Mohamad Kasim bin Mohamad said Marikar |
| Mayor Cina | Thoen Liong Hie |

Sumber: *Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie Kalender en Personalia* 1907, hlm. 249.

Selain itu, keistimewaan status *gemeente* adalah dilibatkannya warga untuk menangani berbagai urusan tentang kota. Partisipasi itu terwujud melalui lembaga perwakilan yang disebut *gemeenteraad*.¹⁹ *Gemeenteraad* atau Dewan Kota berkewajiban memberi masukan dan pertimbangan kepada *gemeente* terutama berkaitan dengan pembangunan kota.²⁰ Pada saat pembentukannya, *Gemeenteraad* Makassar beranggotakan 13 orang yang terhimpun berdasarkan ras dan klasifikasi masyarakat Hindia Belanda, yakni sebanyak delapan orang Belanda, tiga orang bumiputera dan dua orang timur asing, serta diketuai oleh Kepala Pemerintahan Daerah *Afdeeling* Makassar.²¹ Jumlah anggota *Gemeenteraad* kerap mengalami penambahan seiring dengan kebutuhan dan usulan dari lembaga itu sendiri.

Perubahan status Makassar membawa perubahan besar bagi perkembangan kota. Pemerintah *gemeente* diharuskan berbenah, memperbaharui serta

¹⁹ Purnawan., *Op.Cit.*, hlm. 15.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

²¹ Dias Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar: Proses "Etnisasi" sebuah kota", *Op.Cit.*, hlm. 83.

memperbaiki sistem dan kinerja mereka, termasuk dalam birokrasi pemerintahannya. Menurut Purnawan Basundoro, kota kolonial sengaja dibangun oleh penjajah dan diperuntukkan untuk mereka sehingga dibuat senyaman mungkin dengan berorientasi Barat.²² Maka tugas utama *gemeente* saat itu ialah dituntut memperbaiki kota diantaranya mengenai; (a) kebersihan, (b) pemakaman, (c) selokan dan air limbah, (d) kesehatan, (e) sempadan atau izin membangun, (f) Jamban dan tinja, (g) pemadam api, (h) perencanaan dan tata kota, (i) bangunan, (j) pendidikan dasar, dan (k) perbaikan kampung.

Dilakukan pula upaya pengelolaan usaha dinas dengan membentuk departemen atau instansi yang mengurus pelayanan publik seperti; Perusahaan air minum, kantor pos, dan balai kota. Demi menjalankan pengelolaan itu dan mengisi pos-pos jabatan dalam pemerintahan membutuhkan pegawai atau *ambtenaar* yang berkualitas. Meskipun jabatan yang diberikan kepada *ambtenaar* bumiputera sebatas pegawai rendahan atau pekerja kasar kantor.

2.2. Ruang Kota Makassar

Setelah Perang Makassar berakhir, Speelman menata Makassar menjadi tiga bagian: pusat pemerintahan di Fort Rotterdam, pusat perdagangan di *Negory Vlaardingen*, dan pemukiman penduduk atau *kampung*. Gambaran tersebut dapat dilihat dari peta berjudul “*Fort Rotterdam and Environs 17th Century*” tahun 1790. Dari peta tersebut Makassar terkesan artistik dengan jalan yang rapi dan tembok penyekat wilayah-wilayah. Fort Rotterdam sebagai pusat pemerintahan

²² Purnawan Basundoro., *Pengantar Sejarah Kota.*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2012), hlm. 79.

digambarkan memiliki tembok-tembok batu yang besar, kubu-kubu dan pintu gerbang. Di utara benteng, tampak wilayah *Vlaardingen* dikelilingi tembok-tembok yang lebih sederhana.²³ Masa itu, kawasan *Vlaardingen* dapat dikatakan sebagai pusat perdagangan Kota Makassar yang dikuasai Belanda.²⁴ Di sebelah timur *Vlaardingen* terdapat Kampung Wajo pemukiman penduduk yang berasal dari Wajo²⁵ dan *Compagnies Tuin* atau kebun kompeni.²⁶

Di sebelah selatan dan utara benteng terdapat Kampung Baru dan Kampung Melayu. Kedua kampung tersebut merupakan pemukiman penduduk bumiputera dari berbagai suku Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, dan lain-lain yang berprofesi sebagai pedagang, petani dan nelayan.²⁷ Di sana mereka tinggal dan menempati rumah-rumah tradisional yang mereka bangun dari bambu dan kayu. Pada abad ke-19 di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, perlahan kehidupan di dalam benteng mulai ditinggalkan dan beralih ke luar benteng (*Extra Muros*). Perbaikan dan penataan lingkungan fisik semakin diperluas ke arah timur dan selatan benteng.

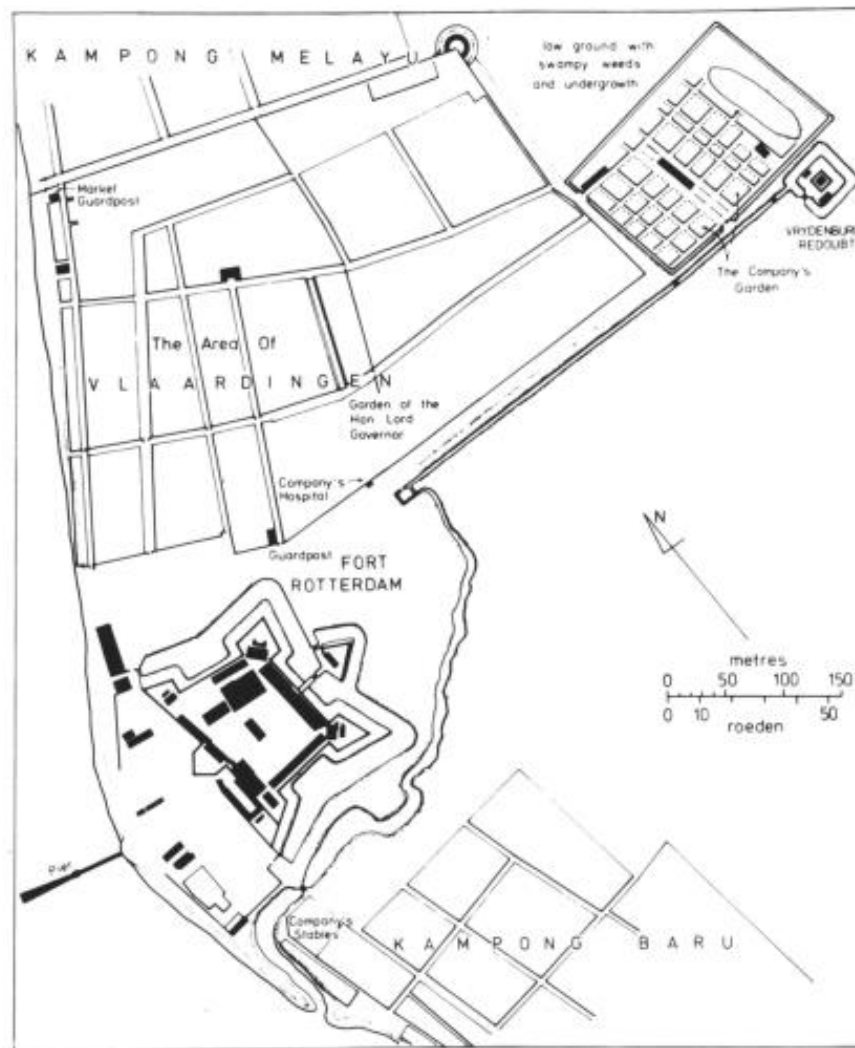
²³ Sarkawi B. Husain., *Op.cit.* hlm. 17.

²⁴ Sri Selvi Rahmayanti. "Korps Schutterij di Makassar Tahun 1875-1917." (Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, 2021) hlm. 19.

²⁵ Pada tahun 1670, wilayah Tosora di Wajo dihancurkan oleh Arung Palakka. Penduduknya mengungsi dan diberi wilayah di Kampung Wajo. Lihat Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim.*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002)., hlm. 147.

²⁶ Heather Sutherland., *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. 27.

²⁷ Sarkawi B. Husain, *Op.Cit.*, hlm. 18.



Gambar 2.1. Peta Fort Rotterdam and Environs 17th Century

Sumber: Leonard Y. Andaya, Terj. Nurhady Simorok., Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. (Makassar: Inninawa, 2004).

Pada awal abad ke-20, pembangunan dan perbaikan fasilitas di Kota Makassar semakin gencar. Puncaknya ketika Makassar memperoleh status *gemeente* pada tahun 1906. Melalui kebijakan pemerintahan langsung dari pegawai Belanda,²⁸ kota dibangun dengan perencanaan yang terstruktur dan rapi. Mereka

²⁸ Ilham Daeng Makkelo., “Menjadi Kota Modern.....” *Loc.Cit.*

berusaha menciptakan kota yang mereka tinggali menjadi lingkungan ideal sebagaimana yang ada di negara asal mereka di Belanda. Mereka menunjuk arsitek Eropa dan para perancang kota untuk mempercantik kota.²⁹ Dengan demikian, Makassar mulai bertransformasi menjadi kota Modern seperti kota-kota lain di Hindia Belanda.

Salah satu upaya menjadi kota modern dimulai dengan penataan dan memproduksi ruang modern. Penataan dan produksi ruang modern di Kota Makassar semakin digencarkan pasca pemerintah kota mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, *Bouw en woonverordening voor de Gemeente Makassar* tahun 1918 memuat peraturan tentang izin bangunan. Kedua, *Hinderordonantie* tahun 1926 mengatur tentang aktivitas perdagangan dan industri yang memerlukan izin khusus.³⁰ Kedua aturan itu mendorong ekspansi cepat atas pemanfaatan ruang kota. Dengan membangun beberapa fasilitas kota bergaya Eropa yang menyiratkan simbol kemodernan seperti kantor pemerintahan, pengadilan, kamp militer, rumah sakit, industri, dan sarana-prasarana untuk rekreasi, seperti hotel, tempat hiburan, pusat bisnis, dan lain-lain.

Bangunan dan fasilitas kota bergaya Eropa mulai didirikan di beberapa wilayah, sebagian besar tak jauh dari benteng Fort Rotterdam. Di utara benteng, tepatnya di *Prins Hendrik Pad* (sekarang jalan Riburane) pada tahun 1896 dibangun *Societeit de Harmonie*, berfungsi sebagai pusat hiburan yang kerap menggelar

²⁹ Purnawan Basundoro,. Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial....., *Op.Cit.*, hlm. 76.

³⁰ Ilham Daeng Makkelo., *Op.Cit.*, hlm.49.

pesta, opera dan acara resmi lainnya untuk tamu penting maupun petinggi Belanda.³¹ Terkadang juga digunakan sebagai gedung perkumpulan sosial elit khusus warga maupun komunitas orang Eropa. Tepat di sebelah timur *Societeit de Harmonie*, terdapat gedung CKC (*Centraal Kantoor Voor de Comptabiliteit*) yang dibangun pada tahun 1910. Pada masa itu, CKC berfungsi sebagai kantor keuangan.



Gambar 2.2. *Societeit de Harmonie* di Makassar pada awal abad 20.

Sumber: *Collections KITLV Digital Image Library* diakses pada 25 Oktober 2022 melalui tautan https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/761270?solr_nav%5Bid%5D=70c489d91946676b77e1&solr_nav%5Bpage%5D=2&solr_nav%5Boffset%5D=10

Pada tahun 1915, di arah timur benteng dibangun *Raad van Justitie* (Kantor Pengadilan Negeri) di *Julianaweg* (sekarang jalan Kartini). Di dalamnya terdapat dua kantor pengadilan, yaitu *Raad van Justitie* terletak di bagian utara dan

³¹ Mohammad Natsir, Syahrawi Mannan, Nurbiyah Abubakar., “*Bangunan Bersejarah di Kota Makassar*” (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Makassar, 2013) hlm. 39.

Landraad di bagian selatan. *Raad van Justitie* diperuntukkan memproses pengadilan masyarakat dari kalangan Eropa, Cina, dan bangsawan lokal. Sedangkan, *Landraad* merupakan gedung pengadilan untuk masyarakat bumiputera. Pada masa itu, bagi mereka yang dijatuhi hukuman di *Landraad* dapat mengajukan banding ke *Raad van Justisie* dan *Hooggerichtshof* (Mahkamah Agung).³²

Sejak ditetapkannya status *gemeente*, pemerintah kolonial mulai membangun kantor pemerintahannya, yaitu *Gemeentehuis* atau kantor walikota. *Gemeentehuis* dibangun di *Gouverneurslaan* (sekarang jalan Balaikota) dan diresmikan oleh *Burgemeester* (walikota) pertama, yaitu J.E. Dambrink pada tahun 1918.³³ Pada tahun 1925, di lokasi yang berdekatan dibangun *Post Cantoor* (Kantor pos) yang berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar korespondensi orang-orang Eropa di Makassar.³⁴ Tepat di sebelah kanannya terdapat *Post en Telegraf Cantoor* yang didirikan tahun 1940.

Selain gedung administrasi, kompleks militer yang cukup besar bagi pasukan militer kolonial juga dibangun di beberapa titik di Kota Makassar. Salah satu yang terbesar dan dapat dilacak eksistensinya hingga sekarang ialah tangsi militer yang ada di asrama Lompobattang milik Kodam VII Wirabuana, yang terletak di selatan Fort Rotterdam.³⁵ Tangsi tersebut ialah kantor polisi militer yang

³² *Ibid.*, hlm. 26.

³³ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁵ Chairunnisa, "Tangsi Militer Kolonial Belanda Di Asrama Lompobattang, Kota Makassar" (Makassar: Skripsi Departemen Arkeologi Universitas

dibangun pada tahun 1935 di *hospitalweg* (sekarang jl. Sudirman). Bangunan tersebut terdiri dari bangunan utama, kantin dan pos jaga.



Gambar 2.3. Gedung Balai Kota (*Gemeentehuis*).

Sumber: Collections KITLV Digital Image Library diakses pada 8 September 2022 melalui tautan https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/703588?solr_nav%5Bid%5D=bd96996609d5cd8fda00&solr_nav%5Bpage%5D=1&solr_nav%5Boffset%5D=2

Pemerintah *gemeente* Makassar juga membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan apotek. Rumah sakit pertama di Makassar ialah *Militaire hospital* diresmikan pada tahun 1917, sekarang bernama Rumah Sakit Pelamonia. *Militaire hospital* merupakan rumah sakit milik kemiliteran yang berlokasi tak jauh dari kantor polisi militer, yakni di *hospital weg*. Tiga tahun setelah rumah sakit pertama di Makassar, tepatnya tahun 1920 berdiri rumah sakit kejiwaan bernama *Krankzinnig Gesticht*, sekarang Rumah Sakit Kejiwaan Dadi di *Matjiniajoweg* (kini

Hasanuddin, 2021) hlm. 2.

jl. Lanto dg. Pasewang).³⁶ Berbeda dengan rumah sakit pada umumnya, Rumah Sakit Dadi kala itu menampung pasien yang mengalami gangguan kejiwaan.

Rumah sakit lainnya milik swasta juga mulai dibangun. Pada tahun 1938 berdiri *Rooms Katoliek Ziekenhuis* atau sekarang kita sebut Rumah Sakit Stella Maris berlokasi di jalan Somba Opu di sekitar pinggir pantai, dekat pemukiman penduduk. Rumah sakit ini dibangun oleh konagregasi Suster Jesus Maria Joseph (JMJ) yang bertujuan melayani rakyat kecil.³⁷ Jika rumah sakit maupun masyarakat kota membutuhkan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis lainnya dapat berkunjung ke Apotek *Rathkamp* yang terletak di *Hoogepad* (sekarang Jl. Ahmad Yani) yang berdiri sejak tahun 1920. Saat itu, Apotek *Rathkamp* adalah milik perusahaan Belanda yang bergerak di bidang farmasi.

Selain fasilitas kesehatan, pemerintah juga membangun fasilitas transportasi untuk menunjang pembangunan ekonomi Kota Makassar dengan wilayah pinggirannya. Pada tahun 1921 pembangunan kereta api di Sulawesi, khususnya Makassar mulai dicanangkan. Rute pertama baru diresmikan pada 1 Juli 1922 yang menghubungkan Makassar, Sungguminasa sampai Takalar sepanjang 47 kilometer. Berdasarkan rujukan peta lama, pemberhentian rute ini tercatat ada 20 lokasi pemberhentian resmi, yang terdiri dari 8 *Halte* (stasiun) dan 12 *Stopplats* (halte). Awalnya kereta api atau trem ini berfungsi sebagai moda mobilisasi pengangkutan

³⁶ Mita Puspita, “Dewan Kota Makassar (*Gemeenteraad van Makassar*) 1918-1938” (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, 2017) hlm. 75.

³⁷ Mita Puspita, *Ibid.*, hlm. 76.

hasil panen untuk komoditi perdagangan, seperti kopi, beras, dan kopra. Namun, pada tahun 1923 dibuka untuk umum.³⁸ Bagi masyarakat yang ingin menumpang trem wajib membeli karcis melalui kantor penjualan karcis trem yang berlokasi di stasiun Jongaya. Sayangnya, pada 1930 rute kereta api ini resmi ditutup, karena terus mengalami kerugian tiap tahunnya.

Transformasi kemodernan di Kota Makassar bukan hanya dilihat dari pemanfaatan atas ruang kota. Pada tahun 1930-an, Kota Makassar juga memiliki pelayanan fasilitas kota yang baik. Pada era tersebut muncul beragam fasilitas modern seperti pusat hiburan, perusahaan penyedia air minum, *Ijsfabriek* atau pabrik es, dan beberapa Perseroan Terbatas yang dibangun untuk kemajuan ekonomi Makassar. Bahkan Makassar menjadi “kota yang paling diterangi di Hindia Belanda”. Listrik dan gas dilayani oleh perusahaan swasta, dan terdapat 4.342 pelanggan listrik di Makassar yang menggunakan 4,7 juta kilowatt tenaga listrik.³⁹ Kendati begitu, fasilitas modern yang disiapkan di kota hanya “dinikmati” kalangan tertentu. Sementara pemukiman bumiputera di kampung-kampung tidak mendapat perhatian yang layak. Kampung dibiarkan tumbuh apa adanya, kotor, bau dan berada dalam “kegelapan” tanpa sentuhan teknologi modern.⁴⁰ Beberapa

³⁸ Fadli Nasrul, Najamuddin, Asmunandar, “Transportasi Kereta Api Rute Makassar-Takalar (1922-1930)” *Jurnal Patingalloang: Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan*, Vol. 5 No. 3, Juli 2018., hlm. 9.

³⁹ Dias Pradadimara, *Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁴⁰ Ilham Makkelo, “Kekerasan dan Kriminalitas di Perkotaan: Anomali Kota Makassar Modern pada Abad ke-20.” *Jurnal Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2019., hlm. 54.

fasilitas publik inklusif juga hadir seperti sekolah, bank, pasar, hotel, bioskop dan lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan sosial dan ekonomi Kota Makassar.

2.3. Kondisi Ekonomi Perdagangan di Kota Makassar

Makassar sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan dengan pelabuhan transit internasionalnya. Posisinya yang strategis menjadikan Makassar sebagai titik temu antara dunia niaga belahan timur (Maluku dan Papua), barat (Kalimantan, Malaka, Sumatra, Jawa, Asia Selatan dan Eropa), utara (Filipina, Jepang dan Cina) dan selatan (Nusa Tenggara dan Australia).⁴¹ Sejak abad ke-16 Pelabuhan Makassar memikat pedagang dari seluruh dunia: Melayu, Cina, India, Portugis, Inggris, Spanyol dan Belanda yang hendak ke Maluku untuk memperoleh rempah-rempah.⁴² Kekuatannya sebagai pelabuhan transit mampu meramaikan arus perdagangan dan pertukaran komoditas di Pelabuhan Makassar. Berbagai komoditas dagang hilir mudik masuk dan keluar dari Makassar, seperti rempah-rempah, beras, jagung, kopi, kain tenun, kayu cendana, kopra, budak dan produk hasil laut.⁴³

Awal abad ke-19 di bawah kuasa Pemerintahan Hindia Belanda, Pelabuhan Makassar yang terletak di wilayah pesisir pantai *Vlaardingen* direnovasi. Catatan

⁴¹ Nahdia Nur, Bambang Purwanto, Djoko Suryo., “Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan, pada Tahun 1900-an sampai dengan 1930-an.” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 4, No. 1 Juni 2016., hlm. 617.

⁴² Heather Sutherland dalam pengantar Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, *Op.Cit.*, hlm. xi.

⁴³ Nahdia Nur, *Ibid.*

tahun 1803 menggambarkan panjang dermaga 278 kaki (sekitar 83,73 m), lebar ke darat sembilan kaki (sekitar 2,74 m), dan ke laut 10 kaki tiga inci (sekitar 3,14 m).⁴⁴ Periode 1800-1846, rata-rata setiap tahunnya pelabuhan Makassar dikunjungi 1-3 jung Cina, 2-8 kapal Eropa, dan 30-80 perahu Padewakang. Pada bulan Desember atau Januari kapal Eropa datang dari Batavia, kemudian melanjutkan pelayaran ke Maluku pada bulan Februari. Pada Februari jung Cina datang dan berlabuh hingga bulan Juni. Sementara itu, perahu Bumiputera berdatangan pada bulan Juni dan meninggalkan dermaga pada Agustus.⁴⁵ Setelahnya Pelabuhan Makassar kembali sepi, meski sesekali kapal api dari Eropa juga berkunjung.

Hiruk-pikuknya kegiatan berniaga di pelabuhan memancing pertumbuhan ekonomi penduduk di sekitarnya. Seperti wilayah di sekitar *Pasarstraat* dan *Chinastraat* menjadi wilayah ketiban untung. *Pasarstraat* (sekarang jalan Nusantara) merupakan akses utama pelabuhan. Sebelum tahun 1850 terkenal sebagai pusat perdagangan dengan deretan toko, kantor dagang, dan gudang-gudang yang terbentang dari utara ke selatan.⁴⁶ Begitupun dengan *Chinastraat* (pada abad ke-20 menjadi *Templestraat* dan sekarang jalan Sulawesi) yang berdampingan dengan *Passarstraat*, merupakan jalan paling penting baik untuk pemukiman maupun perdagangan. Pada pertengahan abad ke-18 terdapat sekitar 70 rumah, 60% milik orang Cina dan 35% milik orang Eropa.⁴⁷ Perekonomian

⁴⁴ Edward L. Poelinggomang., *Op.Cit.*, hlm 150.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

⁴⁷ Sri Selvi Rahmayanti., *Op.Cit.*, hlm. 26.

kedua jalan itu terus tumbuh dan menunjukkan sisi modernnya menjelang abad ke-20 dengan munculnya tiga toko pakaian besar, yaitu Hotchand Kemchand, Bombay Moerah, dan Liberty di *Pasarstraat*.⁴⁸

Selain *Passarstraat* dan *Chinastraat* wilayah di *Negory Vlaardingen* lainnya juga menjadi sasaran perekonomian kota. Banyak pedagang dan pengusaha yang membangun toko maupun perusahaan di jalur *Marosstraat* hingga ke kebun kompeni mengakibatkan perniagaan kota menjadi semakin dinamis. *Marosstraat* merupakan jalur utama antara kota dan daerah pedalaman, baik dari arah utara (Maros), timur (Gowa) dan selatan (Takalar). Namun, pusat pertokoan lama, yaitu pasar utama (*mata pasara*) yang menjual produk Cina-produk hasil laut di daerah Paotere tetap menjadi daerah tersibuk di Kota Makassar.⁴⁹

Transformasi akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 menjadi titik kulminasi perekonomian Kota Makassar. Pada akhir abad ke-19 terdapat beberapa pabrik yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti *Olifabriek* atau pabrik minyak di *Matjinajo* bagian utara *Koningsplein*. Di *Patoenoengweg* berdiri *Ijsfabriek* atau pabrik es bernama Aurora dan *Gasfabriek* atau pabrik gas.⁵⁰ Awal abad ke-20, Pabrik Es Aurora berinovasi dengan menjual produk kulkas yang dapat

⁴⁸ Dias Pradadimara, “*Penduduk Kota,.....* ”.,*Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁹ Edward L. Poelinggomang, *Op.Cit.* hlm. 148.

⁵⁰ Asmunandar, *Kota Makassar dalam Empat Abad, dalam Makassar Nol Kilometer*. penyunting: Anwar Jimpe Rachman (Makassar: Tanah Indie Press, 2014), hlm. 109.

dibeli langsung di pabrik maupun toko NAM AH&Co di jalan *Templestraat*.⁵¹ Selain itu, pemerintah kota juga membangun perusahaan air minum daerah (*Gemeente Waterleidingbedrijf*) di jalan Ratulangi yang diresmikan tahun 1924.



Gambar 2.4. Iklan dari surat kabar Pemberita Makassar

Sumber: Pemberita Makassar, 17 Desember 1937.

Perekonomian di Pelabuhan Makassar juga mengalami peningkatan. Meskipun KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*)⁵² mulai beroperasi dan memonopoli kegiatan ekspor-impor mengakibatkan pihak lain (kapal-kapal asing maupun bumiputera) merana, tetapi perekonomian rakyat tetap berkembang. Salah satunya karena komoditas kopra. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku produk kebutuhan sehari-hari seperti minyak masak dan sabun.⁵³ Tingginya permintaan pasar Eropa terhadap

⁵¹ *Pemberita Makassar*, 17 Desember 1937.

⁵² KPM merupakan Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda sebagai perusahaan angkutan negara di Hindia Belanda yang menghubungkan langsung pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda dengan negara induk (Belanda). KPM mulai beroperasi pada 1 Januari 1891 dengan memonopoli pelayaran untuk kegiatan impor dan ekspor di jalur subsidi di Hindia Belanda. KPM melayani sembilan belas jalur pelayaran subsidi, tujuh jalurnya terpusat di wilayah perdagangan Makassar.

⁵³ Arlyana, Abubakar dkk, *Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan*, (Jakarta:Bank Indonesia Institute, 2019), hlm.

kopra membuat pemerintah kolonial memfokuskan kegiatan ekspornya kepada komoditas ini. Dengan memperluas gudang penampungan kopra sampai ke luar pelabuhan, yaitu di kampung Mattoanging dekat Paotere berjarak dua kilometer dari Pelabuhan Makassar pada tahun 1917.⁵⁴

Kopra didapatkan dari hasil produksi penduduk di Sulawesi Selatan, terutama dari Pulau Selayar dan pantai Mandar yang kemudian dikumpulkan di Pelabuhan Makassar untuk diekspor ke pasar Eropa melalui layanan KPM.⁵⁵ Kondisi tersebut membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha baru dari berbagai kalangan baik dari Eropa, Bumiputera maupun Timur Asing. Pemerintah Hindia Belanda sendiri memiliki *Olie Fabrieken Insulinde* (OFI) di Makassar yang bergerak dalam perdagangan minyak kelapa dan kopra. OFI juga banyak menaungi pedagang kopra. Para pedagang di bawah naungannya dapat mengekspor kopra asalkan memakai merek “Kopra OFI Makassar”. Pihak OFI Makassar juga menampung beberapa ton kopra di pergudangan mereka.⁵⁶

Penduduk bumiputera di Sulawesi Selatan juga memproduksi dan mengkonsumsi minyak kelapanya sendiri, terkadang dipasarkan di Makassar.

42.

⁵⁴ Abd. Rasyid Asba, *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 148.

⁵⁵ Dias Pradadimara, “Satu Cerita Berbeda Tentang Krisis: Perubahan dan Transformasi di Wilayah Pedesaan Sulawesi Selatan pada Abad Ke-20” dalam *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi selama Abad 20*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016) hlm. 200.

⁵⁶ Abd. Rasyid Asba, *Op.Cit.*, hlm. 150.

Walaupun minyak impor dari Eropa— kelapa sawit yang dikelola perusahaan perkebunan juga beredar dalam jumlah sedikit di kalangan penduduk kota. Namun penduduk lokal lebih menyukai minyak kelapa tradisional karena baunya lebih harum dari minyak kelapa buatan pabrik.⁵⁷ Saudagar-saudagar bumiputera, Melayu, dan Cina di Makassar mulai berinvestasi pada komoditi ini. Investasi mereka, termasuk OFI Makassar disokong oleh sistem kredit dan pinjaman modal yang disediakan *De Javasche Bank*. Pada masa depresi 1930-an para saudagar ini banyak yang gulung tikar.

De Javasche Bank (DJB) merupakan bank swasta milik Hindia Belanda yang didirikan oleh komisaris jenderal Du Bus de Gisingnies bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian yang menimpa koloni Hindia Belanda pasca VOC bangkut. DJB di Makassar ada sejak tahun 1864. Kehadiran DJB menstimulus perekonomian di Makassar yang saat itu pula beberapa bank swasta sudah ada di Makassar, seperti NHM (*Nederlandsche Handel-Maatschappij*), Bank Escompto (*Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij*), HSBC (*Hongkong & Shanghai Banking Corporation*), *Spaarbank van Makassar*, dan lain-lain.⁵⁸ Kehadiran bank-bank ini juga membuka peluang bagi kalangan bumiputera untuk bekerja sebagai pegawai.

Terjaminnya sistem investasi dan kredit, kemajuan ekonomi dan modernitas kota pada awal abad ke-20 memberi kesempatan kepada penduduk kota untuk

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 146.

⁵⁸ Arlyana, dkk., *Op.Cit.* hlm. 66.

mengubah gaya hidupnya dengan membeli properti mewah maupun menikmati fasilitas hiburan di kota. Namun hanya sebagian kalangan yang mapan secara finansial; mayoritas penduduk Eropa. Meningkatnya gaya hidup penduduk kota merupakan salah satu indeks kesejahteraan dan kemajuan ekonomi Kota Makassar pada awal abad ke-20. Pembahasan mengenai gaya hidup penduduk dan hiburan kota akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2.4. Sosial Budaya Penduduk Kota Makassar

Kemajuan ekonomi, produksi ruang dan pengenalan ‘teknologi’ dalam transformasi kemodernan di Makassar memberi warna baru bagi kehidupan masyarakat kota. Makassar sebagai kota kolonial sejak lama menjadi medan konsentrasi berbagai etnis.⁵⁹ Namun seperti yang dipaparkan Brenda S.A. Yeoh, kota kolonial menampung masyarakat yang sangat beragam, terdiri atas yang menjajah dan yang terjajah, para pendatang dan penduduk bumiputera. Mereka hidup dalam satu kota, tetapi tempat dan posisi mereka terkotak-kotakkan berdasarkan perbedaan ras atau warna kulit.⁶⁰ Segregasi ras menjadi ciri khas kota kolonial.

Segregasi ras di Kota Makassar diterapkan sejak abad ke-17, yaitu ketika Kompeni VOC mulai mengembangkan kota. Wilayah *Negory Vlaardingien* dan kampung-kampung yang menjadi basis pemukiman penduduk bumiputera dibuat berlapis-lapis dengan membedakan tempat tinggal mereka berdasarkan etnisitas.

⁵⁹ Ilham Daeng Makkelo, *Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 44.

⁶⁰ Purnawan Basundoro., *Pengantar Sejarah Kota.*, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, segregasi tersebut semakin dipertegas melalui *Regerings Reglement 1854* yang memuat stratifikasi sosial dengan membagi penduduk atas tiga kelas berdasarkan klasifikasi ras. Kelas utama terdapat orang Belanda Totok beragama kristen, Belanda-Indo, dan kalangan Eropa lainnya. Sedangkan kelas menengah ialah orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India. Sementara kelas paling bawah ditempati oleh masyarakat bumiputera.⁶¹

Segregasi ras dilakukan sebagai upaya penjajah yaitu pemerintah kolonial untuk memuluskan kepentingan mereka dalam mengontrol penduduk dan menghindari konflik horizontal.⁶² Meskipun di tempat-tempat tertentu, hubungan antar etnis hampir tidak menjadi persoalan.⁶³ Namun, pada situasi tertentu, disparitas sosial antara masyarakat pribumi dengan kelas sosial lain begitu terasa, misal dalam penataan pemukiman penduduk dan pendidikan.

Orang-orang Eropa di Kota Makassar mayoritas bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan militer. Tempat tinggal mereka terkonsentrasi di dua distrik, yaitu Distrik Makassar dan Distrik Wajo, khususnya di Kampung Makura dan Kampung Balandaya.⁶⁴ Sejak akhir abad ke-19, Distrik Makassar (mencakup

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 77.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Ini berlaku di kebanyakan tempat yang tidak mengenal perbedaan kebijakan rasial. Misalnya tempat rekreasi, stasiun, klinik, area pertokoan, dan pusat perbelanjaan. Masyarakat bebas mengakses lokasi-lokasi tersebut. Lihat Purnawan Basundoro, "Penduduk dan Hubungan Antaretnis di Kota Surabaya pada Masa Kolonial", dalam Jurnal *Paramita*, Volume 22, No. 1, Tahun 2012, hlm. 8.

⁶⁴ Sarkawi, Sejarah Sekolah Makassar.... Op.Cit., hlm. 24.

wilayah *Vlaardingen*) merupakan pusat kota dan daerah elite dengan tersedianya fasilitas kota yang baik di sekitarnya, termasuk rumah ibadah mereka, yaitu dua gereja, diantaranya Gereja Protestan (*De Protestante Kerk*) yang berdiri sejak 1885 di Jl. Balai kota dan Gereja Katolik (*Roomsch Katolieke Kerk*) di *Komeedilaan* (sekarang Jl. Kajaolalido) berdiri sejak 1892.⁶⁵

Orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India, umumnya bergerak dalam bidang perekonomian yang tersebar di dua distrik berdampingan dengan orang-orang Eropa. Di Distrik Wajo, orang-orang Cina menempati kawasan khusus yang disebut *Chinese kamp* atau kawasan Pecinan. Aktivitas mereka berpusat di *Chinesesstraat* yang sejak abad ke-18 merupakan jalan terpenting bagi perdagangan dan pemukiman mereka. Tetapi mereka juga tersebar di beberapa kampung, mengingat pasar perdagangan dan profesi mereka yang dibutuhkan masyarakat kota. Di kawasan Pecinan juga dibangun beberapa Klenteng karena mayoritas dari mereka penganut Buddha dan Khong Hu Chu. Sedangkan, Orang-orang Arab dan India juga tinggal di kawasan khusus yaitu *Arabische Kamp* atau kampung Arab.⁶⁶ Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang kain, rempah-rempah, obat-obatan herbal dan imam masjid.

Masyarakat bumiputera di Kota Makassar juga merupakan kelompok heterogen. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat dari suku Bugis dan suku Makassar, Keduanya menempati wilayah di distrik Ujung Tanah dan Distrik Wajo.

⁶⁵ Mohammad Natsir, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁶⁶ Sarkawi, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Namun banyak pula penduduk bumiputera yang berasal dari luar Sulawesi Selatan, seperti kelompok suku Melayu, Ambon, Buton, Minahasa, Jawa, Madura, Mandar dan lain-lain yang tersebar di wilayah Distrik Mariso dengan beberapa kampung yang diberi nama sesuai asal mereka, seperti Kampung Jawa, Kampung Maluku, Kampung Melayu, Kampung Galesong, Kampung Butung, dan lain-lain.⁶⁷

Pekerjaan mereka bervariasi, baik sebagai pegawai pemerintahan, militer, pedagang, petani, nelayan hingga buruh-buruh kasar.⁶⁸ Pegawai pemerintahan dan militer kebanyakan diisi oleh orang-orang Ambon yang tinggal di Kampung Ambon atau *Ambonkamp* di Distrik Makassar. Bagi penduduk bumiputera lainnya seperti suku Makassar, Bugis, Selayar, Jawa dan Madura umumnya berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan dan buruh.⁶⁹ Orang Melayu bekerja sebagai pegawai sara' (agama) dan saudagar maupun syahbandar.

Pada abad ke-20, Makassar merupakan kota kosmopolitan dengan penduduk multikultural. Kesan kosmopolitan itu diperkuat dengan hadirnya 9 konsulat yang mewakili negara-negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan China.⁷⁰ Selain itu, dapat dilihat dari komposisi dan peningkatan pesat jumlah penduduk dalam tiga dekade awal abad

⁶⁷ Asmunandar, "Kota Makassar dalam Empat Abad...." *Op.Cit.*, hlm. 118.

⁶⁸ Sarkawi., *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Dias Pradadimara, "Penduduk Kota,.....". *Loc.Cit.*,

ke-20. Berdasarkan sensus Pemerintah Hindia Belanda, jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 1905 diperkirakan berjumlah 26.000 jiwa.⁷¹

Kemudian tahun 1916 jumlahnya meningkat 50%, yakni 39.000 jiwa, terdiri dari 1.500 orang Eropa, 6.900 orang Cina, 300 orang Timur Asing lainnya, serta 30.300 orang bumiputera.⁷² 14 tahun kemudian, tahun 1930 jumlah tersebut bertambah 3x lipat menjadi 84.855 jiwa dengan 3.447 orang Eropa, 600 orang Arab, 15.363 orang Cina, dan 65.445 orang bumiputera dengan komposisi; suku Makassar 37.889 orang, Bugis 15.799 orang, Jawa dan Madura 4.594 orang, Selayar 1.080 orang, Minahasa 844 orang, Buton 515 orang, Banjar 415 orang, dan Mandar 412 orang. Peningkatan tersebut dipicu oleh transformasi kemodernan di kota dengan tersedianya lapangan kerja baru, perluasan kebutuhan administrasi pemerintah, dan pendidikan yang terpusat di kota.

Sejak tahun 1901 Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis. Dengan prinsip edukasinya, Pemerintah mendirikan sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak bangsa Eropa, Indo, Timur Asing maupun bumiputera.⁷³ Seperti *Europesche Lagere School* (ELS) Sekolah Dasar Eropa diperuntukan bagi anak-anak Eropa dan peranakan. Pendidikan bagi anak-anak Timur Asing dan peranakannya, pemerintah mendirikan *Hollandsch-Chineesche School* (HCS) Sekolah Cina Berbahasa Belanda pada tahun 1908.

⁷¹ Edward L. Poelinggomang., Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan..... *Op.Cit.*, hlm. 173.

⁷² Sarkawi,. *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁷³ *Ibid.* hlm. 61-87.

Bagi anak-anak pribumi yang ingin mendapat pendidikan Barat, pemerintah mendirikan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Sekolah Bumi Putera Berbahasa Belanda. Membangun pula pendidikan lanjutan seperti *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) pada tahun 1920. Serta membangun sekolah kejuruan seperti *Opleiding Europese Lager School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) Sekolah Latihan bagi Para Pejabat Pribumi dan *Kweekschool Voor Inlandsche Schepelingen Te Makassar* yaitu Sekolah Kejuruan Pelayaran.

Berdirinya beberapa sekolah mengindikasikan bahwa pemerintah kolonial dan penduduk kota memiliki kesadaran pentingnya pendidikan. Meskipun jumlah penduduk terpelajar sangat kecil dari presentasi penduduk Kota Makassar keseluruhan, terutama dari bumiputera karena hanya keturunan bangsawan dan masyarakat terpandang yang mampu bersekolah. Mereka yang mengenyam pendidikan kolonial—termasuk *ambtenaar* bumiputera sangat mungkin untuk menerapkan pengetahuan dan ide-ide modern khas Barat ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara berpakaian, tingkah laku, selera maupun hiburan yang meniru gaya hidup masyarakat Eropa.

Salah satu potret perubahan gaya hidup penduduk Kota Makassar ialah kepemilikan properti mewah, menikmati fasilitas dan hiburan di kota. Di beberapa koran *Pemberita Makassar* muncul iklan penjualan sepeda, mobil, bahkan sewa mobil. Sepeda model onthel dari berbagai merek seperti *Speedy*, *Person*, *Hercules* dan lain-lain yang identik dengan roda besar, tubuh sepeda yang tipis tapi kokoh, dan stang yang lurus maupun bengkok ke bawah. Sepeda-sepeda tersebut dapat dibeli di toko di daerah *Passarstraat*, namun ada satu toko lebih lengkap karena

menyediakan perkakas sepeda seperti lampu, lonceng dan lain-lain yang dapat dipesan melalui telepon di toko Handel Mij “*Louvre*”.⁷⁴

Pembeli sepeda di Kota Makassar kebanyakan dari orang Cina dan orang bumiputera kaya. Pada tahun 1937 ada dua laporan pencurian sepeda milik orang Tionghoa dan orang Maluku. Seorang Tionghoa berinisial L.B.T tinggal di *Boelekangstraat* kehilangan sepeda merk Speedy seharga f 47.50 yang ia letakkan di depan rumahnya. Seorang penduduk bumiputera di kampung Maluku, berinisial S juga kehilangan sepedanya merk Person seharga f 35 yang dicuri sewaktu ia belanja di tempat pelelangan ikan.⁷⁵

Mobil dengan bermacam merk dan model, bahkan taksi juga hadir di Makassar. Namun banyak pula penduduk yang memiliki mobil pribadi dengan berbagai jenis, seperti sedan italia merk “*Fiat*” dari model yang paling irit dan paling trendy seperti 1500 sang “Kereta Ajaib”. Mobil sedan Amerika “*Dodge*” juga ada, termasuk yang paling besar dan mewah *Dodge-Six* “*De Luxe*” dengan 7 tempat duduk. Semua dapat dipesan melalui telepon dengan pedagang mobil H.P Lienhardt di *Passarstraat*.⁷⁶ Tersedia pula mobil mewah dari Inggris dengan merk “*Buick*” keluaran tahun 1930 yang modelnya seperti mobil Kerajaan Inggris seharga f 5600 dan pembayarannya dapat dicicil di *showroom N.V Celebes Motor*

⁷⁴ *Pemberita Makassar*, 20 April 1914.

⁷⁵ *Pemberita Makassar*, 18 Desember 1937.

⁷⁶ Dias Pradadimara, “Penduduk Kota,.....”. Loc.Cit.,

Company.⁷⁷ Jika masyarakat tidak ingin membeli mobil tapi membutuhkannya, ia dapat menyewanya. Toko *Oie Sioe Tjoang* di *Groote Straat* milik pedagang Cina memberikan sewa auto-auto atau mobil dengan harga paling murah yang dapat dipesan pula melalui telepon. Mereka juga membeli dan menjual mobil bekas.⁷⁸



Gambar 2.5. Iklan dari surat kabar Pemberita Makassar

Sumber: Pemberita Makassar, 18 Desember 1917.

Namun seperti yang disampaikan Ilham, meluasnya teknologi kendaraan bermotor baik mobil maupun motor pada awal abad ke-20, membawa konsekuensi besar bagi perubahan tatanan dan keteraturan. Para sopir (*chauffeur*) yang angkuh mengemudikan mobil dengan kencang seringkali menyebabkan kecelakaan. Di tahun 1930-an, tabrakan antara mobil, sepeda motor, sepeda, dokar dan roda tiga adalah pemandangan yang lazim. Terjadi karena ketidak hati-hatian pengemudinya maupun kelengkapan kendaraan, seperti tidak ada lampu saat malam hari.⁷⁹ Pada

⁷⁷ *Pemberita Makassar*, 18 Maret 1930.

⁷⁸ *Pemberita Makassar*, 18 Desember 1917.

⁷⁹ Ilham, “Kekerasan dan Kriminalitas di Perkotaan.....” *Op.Cit.*, hlm. 55.

tahun 1937 ada laporan kecelakaan mobil oleh terdakwa seorang Belanda berinisial J yang secara tidak sengaja menabrak seorang pengguna sepeda sampai mati dengan mobilnya.⁸⁰

Sementara itu, pusat hiburan di kota mulai menjamur. Dari lapangan rakyat, ruang teater hingga kamar tidur eksklusif. Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Kolonial membangun *Koningsplein* (sekarang Lapangan Karebosi) sebagai ruang publik dan sarana rekreasi maupun olahraga untuk penduduk kota. Pada Januari 1938 Pesta Oranje⁸¹ diadakan di Kota Makassar. *Koningsplein* menjadi pusat festival tersebut. Selain *Koningsplein*, pusat hiburan lain juga merambah di kota. *Societeit de Harmonie* memanglah pusat dan aktivitas hiburan kota, namun hanya kalangan Eropa yang beraktivitas di sana. Maka, tempat hiburan yang inklusif untuk semua kalangan juga hadir. Beberapa bioskop yang muncul di Kota Makassar pada periode itu, diantaranya ialah Bioskop *Luxor*, Bioskop *de Ster* dan Bioskop *Sintje*. Pada masa itu, bioskop-bioskop menjadi tongkrongan muda-mudi kota,⁸² bahkan pada masa Depresi 1930 bioskop Sintje menjadi lokasi aksi protes para *ambtenaar* dari semua kalangan. Hotel-hotel juga hadir seperti Grand Hotel, Empress Hotel, Oranje Hotel, dan Hotel Ankie di jalan *Chinastraat*.

⁸⁰ *Pemberita Makassar*, 11 Desember 1937.

⁸¹ Pesta *Oranje* tahun 1938 merupakan hari besar untuk menyambut kelahiran anggota Kerajaan Belanda. Semua penduduk di Hindia Belanda, termasuk Kota Makassar juga merayakan festival ini dengan semarak. Dari semua kalangan baik Eropa, Timur Asing maupun Bumiputera berpartisipasi untuk memeriahkan festival tersebut. Lihat *Pemberita Makassar*, 11 Desember 1937.

⁸² *Pemberita Makassar*, 29 September 1914.

2.5. *Ambtenaar* Bumiputera dan Gaya Hidup Kelas Menengah di Kota

Makassar

Selain berstatus *gemeente*, Makassar juga menjadi ibukota *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden* sejak Pemerintah Hindia Belanda berkuasa.⁸³ Artinya, pusat pemerintahan *Proviencie* juga berada di Makassar. Maka, Kota Makassar juga berbagi ruang terhadap kehadiran kantor pemerintahan *Proviencie* seperti kantor Gubernur *Groote Oost* di Fort Rotterdam, Rumah Jabatan Gubernur (*Gouverneur Woning*), dan instansi lain milik Pemerintah *Proviencie*, termasuk *ambtenaar*-nya. Kehadiran mereka turut mewarnai keberagaman *ambtenaar* di Kota Makassar kala itu.

Ambtenaar—seperti pada pembahasan sebelumnya merupakan pegawai yang bekerja pada pemerintah kolonial baik sebagai pemimpin yang memiliki wewenang terhadap rakyat maupun mereka sebagai pegawai rendahan dalam instansi pemerintahan. Secara umum, *ambtenaar* digolongkan menjadi dua berdasarkan ras, yaitu *ambtenaar* berbangsa Eropa dan *ambtenaar* bumiputera.⁸⁴ *Ambtenaar* Eropa menjabat posisi tinggi dan penting dalam pemerintahan kolonial. Di Kota Makassar, *ambtenaar* Eropa menjabat sebagai *burgemeester*, *gubernur*, maupun petinggi-petinggi dalam dinas pemerintahan. Sementara itu, *ambtenaar* bumiputera mengisi jabatan sebagai kepala distrik, dewan kota, guru dan pegawai-

⁸³ Sri Selvi Rahmayanti., *Op.Cit.*, hlm.5.

⁸⁴ Heather Sutherland,. Terj. Sunarto.,*Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983) hlm. 22.

pegawai rendahan dalam kantor pemerintahan baik milik pemerintahan *gemeente* maupun *proviencie*.

Ambtenaar bumiputera di Kota Makassar merupakan kelompok yang heterogen, mengingat masyarakat bumiputera juga terdiri dari berbagai suku dan ras. Mayoritas *ambtenaar* bumiputera berasal dari suku Melayu, Jawa, Ambon, dan Manado.⁸⁵ Pekerjaan mereka sebagai *ambtenaar* sudah terkenal sejak Kompeni VOC berkuasa. Memasuki abad ke-20, banyak orang Bugis dan Makassar mulai bersekolah di OSVIA kemudian mengisi profesi ini. Meskipun, jumlah *ambtenaar* di Kota Makassar tidak dapat dipastikan karena belum ditemukan sumber sejarah yang mencatat itu. Namun, Mattulada (1974) telah mengelompokkan *Ambtenaar* Bumiputera atas dua kategori⁸⁶;

1. Kelompok keturunan bangsawan yang setia kepada Belanda dan *Binnenlands Bestuur Ambtenaren* yang biasanya berasal dari daerah-daerah gubernemen dan swapraja.
2. Kelompok *ambtenaar* lainnya yang terdiri atas cendekiawan berpendidikan formal, pemimpin-pemimpin gerakan agama, sosial-politik, pers sekaligus sebagai saudagar.

Keduanya berasal dari lingkungan yang sama, yaitu pendidikan khas barat. Namun, memiliki pandangan dan sikap politik berbeda. Pada kelompok pertama diisi oleh mereka yang menduduki jabatan cukup tinggi dalam pemerintahan.

⁸⁵ Sarkawi,. *Op.Cit.*, hlm. 130.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

Ambtenaar di kelompok ini berasal dari keturunan bangsawan tinggi atau kelompok aristokrat kerajaan pada periode sebelumnya, kendati ditetapkan profesionalitas sesuai kemampuan dalam perekrutannya. Mereka terkenal memiliki loyalitas terhadap pemerintah kolonial.⁸⁷

Kelompok kedua memiliki cara pandang yang berbeda dari kelompok pertama. Mereka hidup di perbatasan antara masyarakat bumiputera dan masyarakat kolonial. Kebanyakan dari mereka berasal dari kelas sosial menengah dan rendahan perkotaan yang sering menjadi korban diskriminasi, meskipun ada pula dari kelompok elite yang mapan. Pandangan sikap yang mirip terhadap satu sama lain, pengalaman yang sama, kekecewaan politik yang tumbuh dan hasrat untuk melakukan usaha ekonomi spekulatif, itulah yang menyatukan mereka dalam gerakan sosial tertentu. Kehadiran keduanya sebagai kelas menengah perkotaan, menguasai cakrawala kehidupan di perkampungan kota.⁸⁸

Di Makassar, *ambtenaar* bumiputera tergolong sebagai kelas menengah kota. Pendidikan khas barat yang mereka terima, prestise status sosial mereka sebagai pejabat maupun pegawai kolonial dalam masyarakat bumiputera, serta tunjangan dan gaji yang mapan tiap bulan membentuk cara mereka berpikir dan berperilaku hingga gaya hidupnya. Meski tidak mendapat informasi detail mengenai gaya hidup *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar, tetapi dapat ditelusuri melalui sumber-sumber tentang perkembangan kota, peniruan perilaku

⁸⁷ Heather Sutherland., *Op.cit.*, hl. 124.

⁸⁸ Kuntowijoyo (1985), "Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas, 1910-1950", Jurnal *Prisma* 11, hlm. 35.

keseharian kelas sosial di atasnya, yaitu orang-orang Eropa, kesejahteraan finansial mereka serta simbol-simbol material yang mereka konsumsi.

Gaya hidup *ambtenaar* bumiputera pada masa itu berkaitan erat dengan kemajuan dan kemodernan kota. Pengaruh kebudayaan barat dan gelombang modernisasi mempengaruhi kebudayaan mereka yang pada akhirnya menjelma ke dalam tingkah laku keseharian, mentalitas, cara pandang dan selera mereka. Kendati begitu, mereka menganggap budaya masa lampau patut dibanggakan. Mereka menilai perlu menggunakan budaya barat demi karier jabatan dan prestisenya dalam masyarakat kolonial.⁸⁹

Dalam bekerja, *Ambtenaar* bumiputera memiliki hubungan baik dengan *ambtenaar* Eropa dan mampu bergaul dalam batas-batas tertentu. Dalam sebuah memoar, hubungan keduanya terjalin erat terutama dalam urusan pekerjaan maupun personal. Hubungan tersebut terjalin karena bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Melayu dan bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa formal baik lisan maupun tertulis. Meskipun para *ambtenaar* Belanda juga diwajibkan mampu berbicara bahasa daerah setempat. Namun itu sulit direalisasikan karena di Sulawesi Selatan terdapat lima belas bahasa dan mutasi jabatan pada masa itu sering terjadi. Maka, pejabat Belanda biasanya dibantu oleh *ambtenaar* bumiputera yang berpendidikan

⁸⁹ Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi.*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 25.

baik.⁹⁰ Dalam kalangan sesama bumiputera terkadang menggunakan bahasa Makassar, bahasa Bugis dan sedikit bahasa Arab.⁹¹

Dalam segi kesejahteraan *ambtenaar* bumiputera, perlu diperhatikan unsur finansial mereka dalam memenuhi kebutuhan primernya. Penghasilan atau gaji mereka dapat digunakan sebagai tolok ukur itu. Para *ambtenaar* bumiputera menerima gaji rata-rata f 50 – f 150 per bulan. Bagi mereka yang menjabat posisi tinggi berpenghasilan f 100- f 250 per bulan.⁹² Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer yang paling mendasar, yaitu sandang, pangan, dan papan.⁹³

Di Kota Makassar, urusan tempat tinggal diatur berdasarkan ras dan etnis. Tidak banyak yang diatur berdasarkan pekerjaannya. *Ambtenaar* dari etnis Bugis dan Makassar biasanya tinggal di Distrik Ujung Tanah dan Distrik Wajo. Sedangkan yang dari luar Sulawesi menempati kampung-kampung, seperti kampung Ambon, Kampung Jawa dan Kampung Melayu. Pemukiman *ambtenaar* bumiputera di Kota Makassar letaknya tak jauh dari pusat kota dan instansi pemerintahan yang cukup mendapat sentuhan kemodernan.

⁹⁰ Amrullah Amir., “Melihat Sejarah Sosial di Makassar Melalui Roman dan Cerpen Karya H.J. Friedericy.” dalam *Konferensi Nasional Sejarah IX*, Jakarta, 5-7 Juli 2011.

⁹¹ HJ Friedericy., Terj. HB Jassin., *Sang Penasihat*, (Makassar: Inninawa, 2021)., hlm. 12.

⁹² Pemberita Makassar., *Penoeroenan Gadji Ambtenaar*, 18 Februari 1931, hlm. 2.

⁹³ Yudi Prasetyo dan FX Wartoyo., *Meneer Baba: Perkembangan Modernisasi Dalam Gaya Hidup Elite Tionghoa Batavia 1900–1942*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012) hlm. 116.

Namun, mayoritas dari mereka menempati rumah kayu berbentuk panggung, ciri khas pemukiman bumiputera. Dengan atap rumah dari daun lontar ataupun rumbia serta perabotan rumah yang sederhana. Bagi *ambtenaar* bumiputera yang mapan, bentuk bangunan tempat tinggal mereka berukuran besar dan luas, memiliki hiasan mewah, penataan halaman yang rapi, dan perabotan lengkap menjadi tolok ukur derajat kekayaan pemiliknya dan status sosial dalam masyarakat.⁹⁴



Gambar 2.6. Rumah Bugis dan Warung Makan di Makassar.

Sumber: *Collections KITLV Digital Image Library* diakses pada 23 Oktober 2022 melalui tautan https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/854187?solr_nav%5Bid%5D=55fa4e4cb9be7d5ab7a5&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0

Keseharian *ambtenaar* Bumiputera umumnya memiliki kesamaan dengan *ambtenaar* Eropa, yaitu melakukan pekerjaan administrasi pemerintahan sesuai dengan jabatannya. Terkadang mereka membaca koran atau mendengarkan radio untuk mengikuti perkembangan zaman. Dari segi pakaian keduanya juga memiliki

⁹⁴ Djoko Soekiman, . *Op.Cit.*, hlm 41.

kemiripan. *Ambtenaar* Eropa biasanya menggunakan jas tutup lengan panjang dengan lencana dan rantai kecil di saku bajunya.⁹⁵ Mereka mengenakan celana panjang berwarna putih serta menggunakan sepatu bermodel pantopel warna hitam ataupun putih. Mereka juga menggunakan topi seperti helm baja maupun topi pet berwarna putih. *Ambtenaar* bumiputera memiliki visualisasi persis seperti itu. Hanya saja ada gambaran berbeda karena perbedaan tingkat jabatannya.



Gambar 2.7. Pegawai *Raad van Justitie* dan *Landraad* Makassar, 1908-1909.

Sumber: *Collections KITLV Digital Image Library* diakses pada 23 Oktober 2022 melalui

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/725132?solr_nav%5Bid%5D=380636dee7b4027d0afc&solr_nav%5Bpage%5D=62&solr_nav%5Boffset%5D=19

Ambtenaar bumiputera jabatan biasa lazimnya berpakaian jas tutup berwarna putih maupun hitam dengan sedikit hiasan di sakunya. Pada bagian bawah, mereka menggunakan kain atau sarung tetapi tak sedikit pula yang mengenakan celana panjang warna putih. Atribut lainnya yaitu penutup kepala atau

⁹⁵ H.J. Friedericy, *Op.Cit.*, hlm. 9.

topi yang digunakan sebagai penanda identitas. Misal *ambtenaar* bumiputera orang Bugis-Makassar atau Sulawesi Selatan umumnya menggunakan *Songkok* (semacam peci yang dihiasi dua pita warna emas di pinggirnya) dan etnis Jawa menggunakan *blangkon*. Namun, banyak juga diantara mereka yang menggunakan topi seperti helm baja yang digunakan ketika mereka bertugas di lapangan. Namun pakaian tersebut hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dalam kesehariannya *ambtenaar* bumiputera bekerja mengenakan kemeja formal lengan pendek berwarna putih dan celana panjang layaknya gambaran pegawai pada umumnya.



Gambar 2.8. Pegawai di Fort Rotterdam Makassar tahun 1941.

Sumber: KITLV Leiden melalui tautan

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/836373?solr_nav%5Bid%5D=8aa8354a9049fe5db971&solr_nav%5Bpage%5D=6&solr_nav%5Boffset%5D=3

Pertemuan penting antara *ambtenaar* bumiputera dengan pejabat tinggi Eropa biasanya berlangsung di ruangan tertutup maupun terbuka, seperti di rumah salah satu pejabat ataupun di pekarangan rumahnya. Pada pertemuan itu biasanya disuguhkan berbagai makanan, minuman dan rokok. Namun, ada sedikit perbedaan menonjol terutama dalam jenis minuman yang disediakan, biasanya ada alkohol,

anggur dan air jeruk yang disebut 'orangeade' atau *orange squash*.⁹⁶ Kebanyakan *ambtenaar* bumiputera lebih menyukai 'orangeade' minuman segar kemasan yang dapat dibeli di *Passarstraat*.



Gambar 2.9 Iklan Orange Squash di surat kabar Pemberita Makassar.

Sumber: Pemberita Makassar, 20 Desember 1937.

Perbedaan lain yang mencolok dapat dilihat dari penggunaan kendaraan dan aktivitas hiburannya. Masyarakat bumiputera umumnya gemar berjalan kaki. Sedangkan, mayoritas *ambtenaar* bumiputera memiliki sepeda dan *Dokar/Delman* sebagai kendaraan ketika bepergian. Kendaraan tersebut juga kerap digunakan oleh orang-orang Eropa, tetapi bagi mereka yang mempunyai jabatan tinggi dalam pemerintahan biasanya menggunakan taksi dan tak sedikit yang memiliki mobil pribadi dengan berbagai macam model.⁹⁷

Untuk aktivitas hiburan masyarakat bumiputera pada awal abad ke-20 umumnya ditandai dengan perayaan-perayaan keagamaan, pasar malam, pesta

⁹⁶ HJ Friedericy, . *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

rakyat yang menampilkan teater tradisional maupun pementasan musik Tionghoa.⁹⁸ Aktivitas hiburan *ambtenaar* bumiputera biasanya meniru pergaulan kelas di atasnya, yakni kelompok elit Tionghoa dan masyarakat Eropa kelas menengah. Setiap akhir pekan, masyarakat Eropa biasanya berkumpul di *Societeit de Harmonie* untuk sekedar berdansa, menyanyi dan menonton orkes atau bioskop. Aktivitas tersebut banyak ditiru oleh *ambtenaar* bumiputera.

Terkadang dari aktivitas hiburan tersebut akhirnya melahirkan perkumpulan baru. Pada paruh kedua abad ke-20 muncul kelompok tertentu yang berasal dari identitas yang sama. Kelompok pelajar, buruh, seni dan lain-lain, termasuk kelompok *ambtenaar* bumiputera mulai terbentuk. Pendidikan yang mereka terima serta keadaan sosial tertentu mendorong mereka untuk berserikat. Di Makassar, setidaknya ada dua kelompok besar *ambtenaar*, yaitu MBB (*Makassaarsche Bestuurders Bond*) dan Serikat Pegawai Selebes. MBB menjadi wadah persatuan *ambtenaar* dari berbagai kalangan di Kota Makassar.⁹⁹ Sedangkan Serikat Pegawai Selebes merupakan serikat pegawai bumiputera dari berbagai macam profesi pegawai seperti pers, guru maupun pegawai pemerintah.¹⁰⁰

Meningkatnya simbol dan kehidupan modern perkotaan, bukan hanya memunculkan perkembangan positif. Di sisi lain, modernitas kota juga melahirkan

⁹⁸ Yerry Irawan., *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar.*, (Yogyakarta: Gramedia, 2013), hlm. 192.

⁹⁹ Pemberita Makassar, *M.B.B (Makassaarsche Bestuurders Bond)*., 16 Mei 1931., hlm. 2.

¹⁰⁰ Pemberita Makassar, *Sarekat Pegawai Selebes*, 27 Mei 1932, hlm. 3.

anomali baru.¹⁰¹ Salah satunya ialah memunculkan aktivitas hiburan yang menjadi racun dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, seperti pelacuran dan perjudian.¹⁰² Gambaran aktivitas perjudian awal abad ke-20 di Makassar, dapat dilihat dari berita harian yang mencatat peristiwa tersebut;

“berapa ratoes orang perampoean dan laki2, toea dan moeda jang ditangkap politie karena berdjoedi sama2 dengan orang militair dalam tangsi roemah sakit. Diantara beberapa ratoes tjoema 187 orang jang ditangkap antaranja beberapa agent politie. Ada jang dihoekoem denda f 25, f 50 sampai f 100, dan kira2 30 orang jang ta bisa bajar dimasokkan kedalam pendjara. Dalam perdjoedian, nistjaja terbit pentjoerian, pemboenoehan. Seorang Controleur berdjoedi memakai wang goevernement f100.000. Beberapa poeleoeh pegawai goevernement berdjoedi memakai wang kas jang disimpan olehnja. Didalam Sociteit de Harmonie boekan sadja orang jang berpangkat berdjoedi, tetapi anak negeri djoega di waktoe habis perlombaan koeda. Anak negeri berdjoedi dengan bangsa Tiong Hoa, Arab, dan lain bangsa.¹⁰³

Dari catatan tersebut dapat dilihat bahwa modernitas kota yang membawa dampak positif maupun negatif, bukan hanya dirasakan pada satu kelas sosial saja, melainkan secara keseluruhan bagi kehidupan sosial masyarakat perkotaan.

¹⁰¹ Ilham, “Kekerasan dan Kriminalitas di Perkotaan.....”, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹⁰² Penataan ruang kota kerap mencederai hak-hak penduduk marginal serta upaya modernisasi ruang-ruang kota menyebabkan menjamurnya aktivitas yang merusak tatanan sosial. Pelacuran berkembang dan menjadi “pelengkap” ruang-ruang modern sejak awal abad ke-20, seperti di hotel, tempat hiburan, restoran, bioskop, pertunjukan stamboel, atau pasar malam. *Ibid.*

¹⁰³ Pemberita Makassar, 4 Agustus 1921, hlm. 1.